

# Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

## 04.

Rapat Umum Pemegang Saham	146.
Dewan Komisaris	147.
Laporan Komite Audit	152.
Laporan Komite Pemantau Risiko	158.
Laporan Komite Nominasi & Remunerasi	164.
Laporan Komite <i>Corporate Governance</i>	167.
Direksi & Komite dibawah Direksi	169.
Kepatuhan	186.
Audit Internal	192.
Audit Eksternal	194.
Internal Kontrol	195.
Evaluasi Risiko & Pengelolaan Risiko	196.
Pihak Terkait & Kredit	198.
Rencana Strategis	199.
Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan	199.
Opsi Saham bagi Direksi & Karyawan Senior	200.
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris, dll.	202.
Hubungan Keuangan	202.
Rasio Gaji	203.
Penyimpangan Internal	203.
Permasalahan Hukum	204.
Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	204.
Buyback Saham	204.
Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial & Sponsor Partai Politik	205.
Self Assesment GCG	205.
Sekretaris Perusahaan	210.
Hubungan Investor	214.
Public Affairs	215.
Laporan Dewan Pengawas Syariah	224.



# 04



## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Penerapan *Good Corporate Governance* merupakan hal penting yang mutlak diperlukan oleh industri perbankan dalam menghadapi perkembangan risiko bisnis dan tantangan usaha yang kian meningkat. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten di PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (“Perseroan”) bertujuan untuk memperkuat posisi Perseroan dalam menghadapi persaingan, memaksimalkan nilai, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi Perseroan dalam mengelola sumber daya dan risiko, dimana pada akhirnya hal ini dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan (*stakeholder*), sehingga dalam jangka panjang, Perseroan dapat beroperasi dan bertumbuh secara berkelanjutan.

Perseroan bertekad menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Perseroan berkeyakinan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* akan sangat mendukung upaya Perseroan dalam mencapai sasaran bisnis serta memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan dalam jangka panjang. Perseroan berkomitmen bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dilaksanakan melalui beberapa hal berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan

Direksi;

2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal Perseroan;
3. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
4. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal;
5. Pengendalian penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
6. Rencana strategis Perseroan; dan
7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan.

Dalam rangka memenuhi peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum, Perseroan berikut ini menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang meliputi:

- a. Cakupan *Good Corporate Governance* sebagaimana disampaikan pada poin 1 sampai dengan poin 7 di atas, yang didukung oleh hasil penilaian (*Self Assesment*) atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* Perseroan;
- b. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Perseroan;

- c. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham Perseroan;
- d. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris serta Direksi;
- e. *Shares option* yang dimiliki oleh Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif;
- f. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
- g. Frekwensi rapat Dewan Komisaris;
- h. Jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Perseroan;
- i. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh Perseroan;
- j. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
- k. *Buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi Perseroan;
- l. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.

### 1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, menunjuk

Auditor Eksternal, serta menentukan jumlah kompensasi/remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS Perseroan telah memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan remunerasi dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi. Selanjutnya, RUPS memberikan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan jumlah remunerasi dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Selama tahun 2009, perseroan telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2009; Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2009. Keputusan-keputusan

selengkapnya mengenai ketiga rapat pemegang saham tersebut di atas dapat dilihat di bagian akhir dari laporan ini.

## 2. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketentuan Bank Indonesia serta ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

### 2.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris

Per tanggal 31 Desember 2009, anggota Dewan Komisaris Perseroan berjumlah 8 (delapan) orang, termasuk Komisaris Utama.

Jumlah tersebut tidak melebihi jumlah anggota Direksi yang berjumlah 9 (sembilan) orang. Empat dari 8 (delapan) anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu JB Kristiadi, Manggi T. Habir, Harry Arief Soepardi Sukadis dan Krisna Wijaya adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 dan No.8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan No. 9/8/PBI/2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di sektor Perbankan yang menetapkan bahwa 50% atau lebih jumlah anggota Dewan Komisaris wajib berwarganegara Indonesia.

Nama	Berlaku efektif sejak		Berakhir pada	Domisili
	Persetujuan Bank Indonesia	RUPS		
Ng Kee Choe, Komisaris Utatma	24 Mei 2006	25 Mei 2009	RUPS 2011	Singapura
JB Kristiadi, Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	5 Desember 2005	25 Mei 2009	RUPS 2011	Indonesia
Gan Chee Yen, Komisaris	21 Oktober 2003	25 Mei 2009	RUPS 2011	Singapura
Victor Liew C. S., Komisaris	21 Juli 2004	25 Mei 2009	RUPS 2011	Singapura
Milan R. Shuster, Komisaris Independen	5 Desember 2000	25 Mei 2009	RUPS 2011	Hongkong
Harry A.S. Sukadis, Komisaris Independen	10 September 2003	25 Mei 2009	RUPS 2011	Indonesia
Manggi T. Habir, Komisaris Independen	22 Juli 2005	25 Mei 2009	RUPS 2011	Indonesia
Krisna Wijaya, Komisaris	19 Juni 2008	25 Mei 2009	RUPS 2011	Indonesia

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau dengan pemegang saham utama atau hubungan lainnya dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak independen. Komisaris Independen Perseroan adalah JB Kristiadi, Milan Robert Shuster, Harry Arief Soepardi Sukadis, dan Manggi T. Habir; empat Komisaris Independen tersebut mewakili 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Peraturan Bank Indonesia tersebut menetapkan bahwa anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada satu lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada satu perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Perseroan.

Tidak termasuk rangkap jabatan apabila anggota Dewan Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perseroan pada kelompok usahanya, dan/atau anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

### 2.2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. Dewan Komisaris Perseroan memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.

Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional Perseroan, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris mengenai hal yang telah diungkapkan di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga bertugas untuk memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan mempertimbangkan rekomendasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau pengawasan otoritas lain.

Sebagaimana Peraturan Bank Indonesia dinyatakan bahwa Dewan Komisaris Perseroan wajib melaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat tujuh hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran atas peraturan

Laporan Komite Pemantau Risiko	Laporan Komite Nominasi & Remunerasi	Laporan Komite Corporate Governance	Direksi & Komite dibawah Direksi	Kepatuhan
Evaluasi & Manajemen Risiko	Pihak Terkait & Kredit	Rencana Strategis	Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan	Opsi Saham bagi Direksi & Karyawan Senior

perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan, namun demikian hal ini tidak dilakukan mengingat selama tahun 2009, Dewan Komisaris Perseroan tidak menemukan pelanggaran peraturan di bidang keuangan dan perbankan, maupun keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris Perseroan memiliki 4 Komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Tata Kelola. Pengangkatan anggota Komite-Komite tersebut dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris Perseroan juga bertugas untuk memastikan bahwa Komite-Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.

### 2.3. Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2009, Dewan Komisaris Perseroan telah menyelenggarakan delapan kali rapat yang diadakan pada tanggal 22 Januari, 13 Pebruari, 24 Maret, 25 Mei, 22 Juni, 13 Juli, 30 September, 15 Desember.

Perseroan telah memenuhi peraturan Bank Indonesia terkait dengan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun dan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 kali setahun. Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan telah secara fisik menghadiri lebih dari 2 (dua) kali rapat Dewan Komisaris. Tabel berikut menggambarkan kehadiran anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam rapat-rapat Dewan Komisaris selama tahun 2009:

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat Dewan Komisaris			
Nama Komisaris	Total Kehadiran	Kehadiran Melalui Telekonferensi	Kehadiran Fisik
Ng Kee Choe	8	2	6
JB Kristiadi	8	-	8
Gan Chee Yen	7	2	5
Victor Liew C.S.	8	2	6
Milan R Shuster	8	2	6
Harry A.S. Sukadis	8	-	8
Manggi T. Habir	8	1	7
Krisna Wijaya	7	1	6

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Agenda yang dibahas dalam rapat-rapat Dewan Komisaris Perseroan selama tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Tanggal & Lokasi Rapat	Agenda Utama
22 Januari 2009 (Jakarta)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan atas risalah rapat sebelumnya &amp; pembahasan masalah-masalah yang mengemuka;</li> <li>2. Kinerja keuangan akhir tahun dan rencana bisnis Perseroan yang diajukan ke Bank Indonesia;</li> <li>3. <i>Derivatives (Target Redemption Forward dan lainnya)</i>;</li> <li>4. Manajemen kapital;</li> </ol>
13 Pebruari 2009*) (Jakarta)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan atas risalah rapat sebelumnya &amp; pembahasan masalah-masalah yang mengemuka;</li> <li>2. Kinerja keuangan akhir tahun;</li> <li>3. <i>Right issue</i>;</li> <li>4. Tresuri</li> </ol>
24 Maret 2009 (Jakarta)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan atas risalah rapat sebelumnya &amp; pembahasan masalah-masalah yang mengemuka;</li> <li>2. Kinerja keuangan Februari 2009;</li> <li>3. <i>Right issue</i> dan Opsi Adira;</li> <li>4. Manajemen likuiditas;</li> <li>5. <i>Derivatives (Target Redemption Forward dan lainnya)</i>;</li> <li>6. <i>Update Satuan Kerja</i>;</li> <li>7. Laporan Komite-Komite;</li> <li>8. Status terakhir NCBS;</li> <li>9. Penentuan tanggal RUPS dan RUPSLB</li> </ol>
25 Mei 2009 (Jakarta)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan atas risalah rapat sebelumnya &amp; pembahasan masalah-masalah yang mengemuka;</li> <li>2. Rasio pembayaran dividen;</li> <li>3. Adira;</li> <li>4. Kinerja keuangan April;</li> <li>5. <i>Derivatives (Target Redemption Forward dan lainnya)</i>;</li> <li>6. Strategi pendanaan jangka panjang ritel;</li> <li>7. (Legal Case);</li> <li>8. Laporan Komite-Komite;</li> </ol>
22 Juni 2009 **) (Jakarta)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Adira call option</li> </ol>
13 Juli 2009 (Jakarta)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan atas risalah rapat sebelumnya &amp; pembahasan masalah-masalah yang mengemuka;</li> <li>2. Strategi Korporat;</li> <li>3. Strategi Tresuri;</li> <li>4. <i>CoC / NPL / &amp; risk matrix organization</i>;</li> <li>5. Strategi <i>funding mix</i>;</li> <li>6. Kasus hukum;</li> <li>7. Kinerja keuangan Juni 2009.</li> </ol>

Laporan Komite Pemantau Risiko	Laporan Komite Nominasi & Remunerasi	Laporan Komite Corporate Governance	Direksi & Komite dibawah Direksi	Kepatuhan
Evaluasi & Manajemen Risiko	Pihak Terkait & Kredit	Rencana Strategis	Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan	Opsi Saham bagi Direksi & Karyawan Senior

Tanggal & Lokasi Rapat	Agenda Utama
30 September 2009 (Jakarta)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan atas risalah rapat sebelumnya &amp; pembahasan masalah-masalah yang mengemuka;</li> <li>2. <i>Derivatives (Target Redemption Forward dan lainnya)</i>;</li> <li>3. Laporan Komite-Komite;</li> <li>4. Kinerja keuangan Agustus 2009;</li> <li>5. Proposisi bisnis pegadaian;</li> </ol>
15 Desember 2009 (Jakarta)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan atas risalah rapat sebelumnya &amp; pembahasan masalah-masalah yang mengemuka;</li> <li>2. Rencana bisnis dan budget 2010;</li> <li>3. <i>Derivatives (Target redemption Forward dan lainnya)</i></li> <li>4. Proposisi bisnis Pegadaian;</li> <li>5. Batas persetujuan kredit;</li> <li>6. Strategi Kustodi/Agen Sekuritas;</li> <li>7. Laporan Komite-Komite.</li> </ol>

Catatan:

\*) rapat dengan format *conference call* untuk sebagian anggota Komisaris

\*\*) rapat dengan format *video conference* untuk sebagian anggota Komisaris

Risalah rapat Dewan Komisaris ditandatangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Dewan Komisaris yang menghadiri rapat maupun yang tidak. Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, atau melalui pemungutan suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris, akan dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat tersebut. Selama tahun 2009, tidak terjadi *dissenting opinion*.

Segala keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui media telekonferensi.

Keputusan yang diambil dalam rapat-rapat Dewan Komisaris Perseroan telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik. Hasil rapat Dewan Komisaris tersebut merupakan rekomendasi dan/atau nasihat yang dapat diimplementasikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Direksi.

## 2.4. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2009, Dewan Komisaris telah melakukan beberapa pertemuan dengan Direksi, baik melalui rapat tatap muka, *conference call*, maupun surat elektronik. Dewan Komisaris berinteraksi secara intensif dengan Direksi maupun para Pejabat Eksekutif Perseroan melalui penyelenggaraan rapat Komite Audit, rapat Komite Nominasi & Remunerasi, rapat Komite Pemantau Risiko, dan rapat Komite Tata Kelola.

Dewan Komisaris bertekad dan akan selalu berupaya agar Perseroan mematuhi seluruh

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

peraturan perbankan yang berlaku di Indonesia. Sepanjang tahun 2009, Perseroan telah mematuhi peraturan Bank Indonesia yang terkait dengan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Loan (NPL)*, *Net Open Position (NOP)*, *Legal Lending Limit (LLL)*, *Reserve Requirement (RR)* dan *Provision for Losses (PPAP)*.

### 2.5. Uji Kemampuan dan Kelayakan (Fit dan Proper Test)

Setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Hal tersebut dibuktikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia dan telah lulus *Fit and Proper Test*.

### 2.6. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan melengkapi dirinya dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan. Pedoman tersebut mengatur hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas/kewajiban anggota Dewan Komisaris serta hal-hal lain yang mengatur etika. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris tersebut disusun berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia terutama peraturan Bank Indonesia tentang *Good Corporate Governance*, dan akan ditinjau ulang secara berkala.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja antara lain mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris tidak boleh memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan, selanjutnya, anggota Dewan Komisaris tidak akan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang telah ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

### 2.7. Remunerasi Dewan Komisaris (dinilai dalam ekivalen jutaan rupiah)

## 3. LAPORAN KOMITE AUDIT

	2009	2008	2007	2006
1 Gaji dan Tunjangan	14.037	13.574	9.864	12.067
2 Tantiem*	TBD	9.150	11.000	7.800
3 LTCP dibayarkan	-	-	-	-
4 Tunjangan lainnya dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya)				
a. dapat dimiliki	1.980	1.980	1.125	1.125
b. tidak dapat dimiliki	768	768	672	768

\* Dibayarkan dalam tahun berikutnya  
Catatan:

Tantiem untuk Dewan Komisaris tahun 2009 akan ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 29 April 2010

Klasifikasi Remunerasi Dewan Komisaris				
Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun *)	2009	2008	2007	2006
Di atas 5 miliar Rupiah	-	-	-	-
Diantara 2 miliar s/d 5 miliar Rupiah	8	8	7	8
Dibawah 2 miliar Rupiah	-	-	-	-

\*) yang diterima secara tunai

Laporan Komite Pemantau Risiko	Laporan Komite Nominasi & Remunerasi	Laporan Komite Corporate Governance	Direksi & Komite dibawah Direksi	Kepatuhan
Evaluasi & Manajemen Risiko	Pihak Terkait & Kredit	Rencana Strategis	Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan	Opsi Saham bagi Direksi & Karyawan Senior

### 3.1. Struktur, Komposisi, Keahlian, dan Independensi Komite Audit

Jumlah anggota Komite Audit Perseroan sebanyak 6 orang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, 2 (dua) orang Komisaris Non Independen, seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Akuntansi/Manajemen Risiko serta seorang Pihak Independen yang mempunyai keahlian di bidang Hukum/Keuangan. Komite Audit Perseroan diketuai oleh Komisaris Independen. Perseroan melarang anggota Direksi untuk duduk dalam keanggotaan Komite Audit dan mewajibkan lebih dari 51% komposisi anggota Komite Audit Perseroan terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Seluruh anggota Komite Audit Perseroan memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik. Komite Audit Perseroan telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan Bapepam-LK yang terkait dengan persyaratan, keahlian, dan independensi anggota Komite.

Nama	Jabatan	Keahlian
Manggi T. Habir	Ketua/Komisaris Independen	Kredit/Keuangan/ Manajemen Risiko / Corporate Governance
Victor Liew C.S.	Anggota/Komisaris	Tresuri/ Manajemen Risiko
Harry A.S. Sukadis	Anggota/Komisaris Independen	Akuntansi/IT/ Manajemen Risiko
Gan Chee Yen	Anggota/Komisaris	Kredit/Keuangan/ Manajemen Risiko
Amir Abadi Jusuf	Anggota/Pihak Independen	Akuntansi / Manajemen Risiko
Felix Oentoeng Soebagjo	Anggota / Pihak Independen	Ahli Hukum/Keuangan

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

### 3.2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit Perseroan bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Komite bertugas untuk memberikan pendapat yang profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris yang antara lain meliputi:

- a. Membuat kajian atas dan menyetujui rencana kegiatan tahunan SKAI.
- b. Melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya serta meyakinkan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- c. Menganalisis atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang

berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

- d. Mengevaluasi dan menganalisis rencana audit Perseroan dan implementasinya. Memastikan bahwa audit telah dilaksanakan dalam frekuensi dan lingkup yang sesuai dan mengawasi tindak lanjut dari laporan-laporan audit.
- e. Menganalisis independensi dan objektivitas akuntan Publik serta kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
- f. Menganalisis kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan.
- g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, KAP, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- h. Komite wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan akuntan publik dan KAP kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan RUPS.
- i. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan

yang berkaitan dengan Perseroan.

- j. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Perseroan yang dimilikinya.
- k. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui Pedoman dan Tata Kerja Komite Audit.
- l. Menyelenggarakan maupun memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi dalam ruang lingkup tugasnya;
- m. Menggunakan jasa konsultan, akuntan, atau pihak eksternal lain yang akan memberikan nasihat atau pelaksanaan suatu investigasi dan pengumpulan informasi yang diperlukan oleh Komite dari karyawan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang sewaktu waktu diberikan oleh Dewan Komisaris.

Laporan Komite Pemantau Risiko	Laporan Komite Nominasi & Remunerasi	Laporan Komite Corporate Governance	Direksi & Komite dibawah Direksi	Kepatuhan
Evaluasi & Manajemen Risiko	Pihak Terkait & Kredit	Rencana Strategis	Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan	Opsi Saham bagi Direksi & Karyawan Senior

### 3.3. Rapat dan Program Kerja Komite Audit

Selama tahun 2009, Komite Audit telah melangsungkan 10 kali rapat. Kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

Nama	Kehadiran dalam rapat
Gan Chee Yen*)	6
Victor Liew C.S.	10
Harry A.S. Sukadis	10
Manggi T. Habir	10
Amir Abadi Yusuf	7
Felix Oentoeng Soebagjo	10

Catatan:

\*) termasuk 1 (satu) kali partisipasi dalam conference call

#### Fokus kajian dari Komite Audit di tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- Peringkat Audit keseluruhan selama tahun 2009 telah mengalami penurunan dengan peringkat Baik (*Acceptable*) sebesar 57%, turun dari 67% pada tahun sebelumnya, sedangkan peringkat audit Tidak Memuaskan (*Unsatisfactory*) meningkat menjadi 6% dibandingkan dengan 4% pada tahun lalu. Untuk menanggulangi tren diatas, Bank telah menginisiasi beberapa hal berikut;
  - Membentuk Special Unit Management untuk fokus pada unit-unit dengan masalah pengendalian;
  - KPI dan insentif dikaitkan dengan hasil peringkat internal SKAI
  - Unit Pengendali dan Manajemen Fraud melapor langsung ke Direktur SEMM
  - Membentuk unit Deteksi Dini dan Pengendali Kantor Pusat untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran pada tahap awal;
  - Menginisiasi pemeriksaan dan perbandingan sebelum dan setelah pencarian dana;
  - Meningkatkan kesadaran terhadap pengendalian dan *fraud* melalui pelatihan
  - Menekankan kembali program *whistle blower*.
- Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah melaporkan hasil audit Tresuri dan transaksi derivatif untuk tahun 2008 kepada Komite Audit. Pada awal tahun 2009, Direksi telah membentuk Satuan Tugas khusus untuk menindaklanjuti temuan audit SKAI. Sepanjang tahun 2009, Komite telah memantau tindakan korektif yang dilakukan oleh satuan tugas tersebut agar sesuai dengan target yang dicanangkan Perseroan.
- Ernst & Young telah melakukan pemeriksaan secara berkala atas kegiatan SKAI sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) mengenai kepatuhan fungsi SKAI dan mengkonfirmasi bahwa persyaratan BI tersebut telah dipenuhi dan telah mencapai taraf *best practices* sesuai standar Internal Audit Internasional.
- Pada semester kedua, Komite Audit secara berkala telah melakukan pemantauan dan membahas temuan-temuan audit dari akuntan publik, KPMG.
- Selama tahun 2009, telah terjadi 26 kasus pelanggaran yang mengakibatkan total kerugian bersih sebesar Rp30,8 miliar, memperbaiki kinerja kuartalan Perseroan bila dibandingkan dengan total kerugian bersih pada tahun sebelumnya sebesar Rp39,1 miliar. Rasio *Gross Fraud Loss* terhadap *Gross Income* juga membaik ke posisi 0,25% dari 0,31% setahun sebelumnya..

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Agenda penting yang dibahas dalam rapat-rapat Komite Audit Perseroan selama tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Tanggal Rapat	Agenda Utama
21 Januari 2009	1. Persetujuan atas risalah rapat terakhir & pembahasan masalah-masalah yang mengemuka;
	2. <i>Update</i> bulanan KPMG;
	3. <i>Update</i> Internal Audit;
	4. Penentuan tanggal rapat berikutnya.
26 Februari 2009	1. Persetujuan atas risalah rapat terakhir & pembahasan masalah-masalah yang mengemuka;
	2. <i>Update</i> bulanan KPMG;
	3. <i>Update</i> Internal Audit;
	4. Penentuan tanggal rapat berikutnya.
23 Maret 2009	1. Persetujuan atas risalah rapat terakhir & pembahasan masalah-masalah yang mengemuka;
	2. <i>Update</i> bulanan KPMG;
	3. <i>Update</i> Internal Audit;
	4. <i>Update</i> Adira Insurance;
20 April 2009	1. Persetujuan atas risalah rapat terakhir & pembahasan masalah-masalah yang mengemuka;
	2. Laporan mengenai penunjukkan Auditor Eksternal untuk tahun 2009;
	3. Syariah;
	4. <i>Update</i> SEMM;
	5. <i>Update</i> Internal Audit;
	6. Penentuan tanggal rapat berikutnya.
26 Mei 2009	1. Persetujuan atas risalah rapat terakhir & pembahasan masalah-masalah yang mengemuka;
	2. <i>Update</i> Internal Audit;
	3. <i>Update</i> bulanan KPMG;
	4. Penentuan tanggal rapat berikutnya.
2 Juli 2009	1. Persetujuan atas risalah rapat terakhir & pembahasan masalah-masalah yang mengemuka;
	2. <i>Update</i> EY – Perkembangan peninjauan SKAI;
	3. Internal Audit;
	4. <i>Update</i> SMEC;
	5. Permasalahan administratif;
	6. Penentuan tanggal rapat berikutnya.

Tanggal Rapat	Agenda Utama
13 Agustus 2009	1. Persetujuan atas risalah rapat terakhir & pembahasan masalah-masalah yang mengemuka;
	2. <i>Update EY</i> – Perkembangan peninjauan SKAI;
	3. <i>Update Internal Audit</i> ;
	4. Penentuan tanggal rapat berikutnya.
10 September 2009	1. Persetujuan atas risalah rapat terakhir & pembahasan masalah-masalah yang mengemuka;
	2. <i>Update SEMM</i> ;
	3. Internal Audit;
	4. Laporan EY;
5 November 2009	1. Persetujuan atas risalah rapat terakhir & pembahasan masalah-masalah yang mengemuka;
	2. <i>Update KPMG</i> ;
	3. Rencana Audit 2010.
16 Desember 2009	1. Persetujuan atas risalah rapat terakhir & pembahasan masalah-masalah yang mengemuka;
	2. <i>Update KPMG</i> ;
	3. Laporan Internal Audit 2009;
	4. Rencana Internal Audit 2010;
	5. Penentuan tanggal rapat berikutnya.

Selama tahun 2009, Komite Audit telah melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Komite Audit telah melakukan rapat bulanan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, yaitu sebanyak 10 kali selama tahun 2009. Selain itu, Komite Audit mengkaji ulang laporan keuangan untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya sebelum dipublikasikan; menindaklanjuti hasil temuan audit oleh SKAI, Akuntan Publik serta Bank Indonesia; merekomendasikan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk oleh Dewan Komisaris melalui RUPS; serta mengawasi proses audit oleh SKAI maupun Kantor Akuntan Publik dan memastikan kesesuaian lingkup kerja audit dengan rencana audit yang disetujui Dewan Komisaris.

Dalam hal proses audit, Komite Audit melakukan *review* dan tindak lanjut atas cakupan, hasil, efektivitas dan obyektivitas dari laporan SKAI, auditor independen serta auditor Bank Indonesia.

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

### 3.4. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit

Komite Audit telah menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Perseroan. Pedoman tersebut mengatur hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas/kewajiban anggota Komite Audit Perseroan serta hal-hal yang mengatur etika. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit tersebut disusun berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia terutama peraturan Bank Indonesia tentang *Good Corporate Governance*. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Perseroan ditinjau ulang secara berkala

seorang Komisaris Independen. Perseroan melarang anggota Direksi untuk duduk dalam keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan mewajibkan lebih dari 51% komposisi anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan memiliki integritas, ahklak, dan moral yang baik. Komite Pemantau Risiko telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang terkait dengan persyaratan, keahlian, dan independensi anggota Komite.

## 4. LAPORAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

### 4.1. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi

Jumlah anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan sebanyak 8 (delapan) orang terdiri dari 3 (tiga) orang Komisaris Independen, 3 (tiga) orang Komisaris, seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Akuntansi dan Manajemen Risiko, dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Hukum/Keuangan. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh

#### Komposisi Komite Pemantau Risiko Perseroan

Nama	Jabatan	Keahlian
Milan R Shuster	Ketua/ Komisaris Independen	Kredit/Keuangan/ Manajemen Risiko
Victor Liew Cheng San	Anggota/ Komisaris	Tresuri/ Manajemen Risiko
Harry AS Sukadis	Anggota / Komisaris Independen	Akuntansi/IT/ Manajemen Risiko
Manggi T Habir	Anggota / Komisaris Independen	Kredit/Keuangan/ Manajemen Risiko / <i>Corporate Governance</i>
Gan Chee Yen	Anggota/ Komisaris	Akuntansi/Keuangan/ Manajemen Risiko
Krisna Wijaya	Anggota/ Komisaris	Kredit/Keuangan/Pasar Modal/Manajemen Risiko
Amir Abadi Jusuf	Anggota / Pihak Independen	Akuntansi / Manajemen Risiko
Felix Oentoeng Soebagjo	Anggota / Pihak Independen	Ahli Hukum / Keuangan

#### 4.2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:

- a. Melakukan evaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko Perseroan telah dilaksanakan secara penuh dan sepiutusnya;
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan unit kerja manajemen risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
- c. Melaporkan kepada Dewan Komisaris risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan dan penerapan manajemen risiko oleh Direksi;
- d. Melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko Perseroan sekurang-kurangnya sekali setahun;
- e. Melakukan evaluasi pertanggung-jawaban pelaksanaan kebijakan manajemen risiko Direksi sekurang-kurangnya secara triwulanan;

- f. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data, dan informasi Perseroan;
- g. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko secara berkala;
- h. Menyelenggarakan maupun memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi dalam ruang lingkup tugasnya;
- i. Menggunakan jasa konsultan, akuntan, atau pihak eksternal lain yang akan memberikan nasihat atau pelaksanaan suatu investigasi dan pengumpulan informasi yang diperlukan oleh Komite dari karyawan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang sewaktu waktu diberikan oleh Dewan Komisaris.

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

### 4.3. Rapat dan Program Kerja Komite

Selama tahun 2009, Komite Pemantau Risiko mengadakan 10 (sepuluh) kali rapat. Berikut adalah daftar kehadiran masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko dalam rapat komite tersebut selama tahun 2009:

Kehadiran dalam Rapat Komite Pemantau Risiko	
Nama	Kehadiran dalam rapat
Milan R Shuster	10
Victor Liew Cheng San	10
Harry A.S. Sukadis	10
Manggi T Habir	10
Gan Chee Yen	6
Krisna Wijaya	9
Amir Abadi Yusuf	7
Felix Oentoeng Soebagjo	10

#### Fokus kajian dari Komite Pemantau Risiko di tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Pada awal tahun 2009, Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan terhadap kondisi likuiditas Perseroan yang dipengaruhi oleh ketatnya kondisi pasar uang serta ketatnya pembiayaan antar bank pada masa itu. Komite memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Direksi agar mempertahankan tingkat likuiditas yang cukup sehubungan dengan potensi penarikan uang.
2. Pada awal tahun 2009, Komite juga berupaya untuk terus melakukan pemantauan atas portofolio kredit korporasi dari beberapa perusahaan besar dan lembaga keuangan, dilanjutkan dengan pemantauan atas portofolio kredit komersial dan UMK serta portofolio Kredit Mikro dan perorangan pada semester kedua. Komite juga melakukan pemantauan atas portofolio kredit dari anak perusahaan, Adira Finance dan Adira Quantum serta portofolio asuransi dan portofolio reasuransi yang dibukukan oleh Adira Insurance. Selain itu, selama tahun 2009, Komite juga senantiasa memonitor kecukupan provisi Perseroan dengan keseluruhan tingkat NPL portofolio kredit.
3. Demi menjaga independensi fungsi risiko dan untuk meningkatkan fungsi pengawasan, Komite merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai pemisahan garis pelaporan antara unit kredit dan kredit unit bisnis untuk pelaporan langsung kepada kepala unit masing-masing. Komite juga merekomendasikan bahwa batasan pinjaman untuk perseorangan maupun kelompok usaha yang proses persetujuannya melibatkan Dewan Komisaris. Pada hal yang sama, Komite merekomendasikan kepada Dewan Komisaris arahan dimana Dewan Komisaris mengkaji atas perpanjangan kredit yang berkaitan dengan *product program* Perseroan. Sejalan dengan yang hal yang diatas, Komite akan mengawasi bisnis *product program* baru yang akan dijalankan pada tahun 2010 sesuai kebijakan Bank.
4. Komite turut memantau pelaksanaan proyek sistem inti NCBS yang telah dimulai di Semarang untuk memastikan bahwa semua permasalahan yang timbul dapat diselesaikan secara seksama sebelum sistem tersebut dikembangkan ke cabang-cabang lain.
5. Komite juga memberikan perhatian khusus pada transaksi *Derivatives (Target Redemption Forward* dan lainnya), serta usaha pembayaran kembali atas transaksi tersebut, termasuk kasus-kasus pengadilan yang timbul.

Agenda yang dibahas dalam rapat-rapat Komite Pemantau Risiko Perseroan selama tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Tanggal Rapat	Agenda Utama
21 Januari 2009	1. Persetujuan atas risalah rapat terakhir & pembahasan masalah-masalah yang mengemuka;
	2. Transaksi dengan pihak terkait;
	3. Portofolio nasional;
	4. Tresuri;
	5. Risiko pasar & likuiditas;
	6. Penentuan tanggal rapat berikutnya.
26 Februari 2009	1. Persetujuan atas risalah rapat terakhir & pembahasan masalah-masalah yang mengemuka;
	2. Transaksi dengan pihak terkait;
	3. Portofolio nasional;
	4. Portofolio Korporat;
	5. Portofolio alat-alat berat;
	6. <i>Derivatives (Target Redemption Forward dan lainnya)</i> ;
	7. Tresuri;
	8. Risiko pasar & likuiditas;
	9. Tinjauan ekonomi makro;
	10. Penentuan tanggal rapat berikutnya.
23 Maret 2009	1. Persetujuan atas risalah rapat terakhir & pembahasan masalah-masalah yang mengemuka;
	2. <i>Retail banking</i> ;
	3. Transaksi pihak terkait;
	4. <i>Update Corporate Banking</i> ;
	5. Risiko pasar & likuiditas;
	6. <i>Derivatives (Target Redemption Forward dan lainnya)</i> ;
	7. Presentasi rencana Gugus Tugas;
	8. Penentuan tanggal rapat berikutnya.
20 April 2009	1. Persetujuan atas risalah rapat terakhir & pembahasan masalah-masalah yang mengemuka;
	2. Transaksi pihak terkait;
	3. Portofolio nasional;
	4. <i>Derivatives (Target Redemption Forward dan lainnya)</i> ;
	5. Matriks organisasi;
	6. Tresuri & Pasar Modal;
	7. Risiko pasar & likuiditas;

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Tanggal Rapat	Agenda Utama
	8. Kasus hukum;
	9. Penentuan tanggal rapat berikutnya.
26 Mei 2009	1. Persetujuan atas risalah rapat terakhir & pembahasan masalah-masalah yang mengemuka;
	2. Transaksi dengan pihak terkait;
	3. Portofolio nasional & risiko terpadu;
	4. <i>Update Corporate Banking</i> ;
	5. <i>Retail Banking</i> ;
	6. <i>Update Derivatives (Target Redemption Forward dan lainnya)</i> ;
	7. Tresuri & Pasar Modal;
	8. Risiko pasar & likuiditas;
	9. Penentuan tanggal rapat berikutnya.
2 Juli 2009	1. Persetujuan atas risalah rapat terakhir & pembahasan masalah-masalah yang mengemuka;
	2. Transaksi dengan pihak terkait;
	3. Perpajakan dan Akuntansi;
	4. Kasus hukum;
	5. <i>Derivatives (Target Redemption Forward dan lainnya)</i> ;;
	6. <i>Portfolio Corporate Banking</i> ;
	7. <i>New Core Banking System (NCBS)</i> ;
	8. Tresuri & Pasar Modal;
	9. Risiko pasar & likuiditas;
	10. Portofolio Nasional;
	11. Penentuan tanggal rapat berikutnya.
13 Agustus 2009	1. Persetujuan atas risalah rapat terakhir & pembahasan masalah-masalah yang mengemuka;
	2. Manajemen portofolio nasional & risiko terpadu;
	3. Bagan organisasi risiko & batasan persetujuan kredit;
	4. <i>Update Derivatives (Target Redemption Forward dan lainnya)</i> ;
	5. Kasus hukum;
	6. Transaksi dengan pihak terkait & <i>regulatory parameter</i> ;
	7. <i>Update LDR/LFR, Tresuri &amp; Pasar Modal; Risiko pasar &amp; likuiditas</i> ;
	8. Penentuan tanggal rapat berikutnya.
10 September 2009	1. Persetujuan risalah rapat terakhir & pembahasan masalah-masalah yang mengemuka;
	2. Manajemen portofolio nasional & risiko terpadu;
	3. <i>Update analisis risiko</i> ;
	4. <i>Portfolio Corporate Banking</i> ;

Laporan Komite Pemantau Risiko	Laporan Komite Nominasi & Remunerasi	Laporan Komite Corporate Governance	Direksi & Komite dibawah Direksi	Kepatuhan
Evaluasi & Manajemen Risiko	Pihak Terkait & Kredit	Rencana Strategis	Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan	Opsi Saham bagi Direksi & Karyawan Senior

Tanggal Rapat	Agenda Utama
	5. Portofolio CMM;
	6. Portofolio Adira CMM cross sell;
	7. <i>Derivatives (Target Redemption Forward dan lainnya);</i>
	8. Kasus hukum;
	9. Transaksi dengan pihak terkait & <i>regulatory parameter</i> ;
	10. Tresuri & Pasar Modal ; Risiko pasar & likuiditas;
	11. Penentuan tanggal rapat berikutnya.
5 November 2009	1. Persetujuan risalah rapat terakhir & pembahasan masalah- masalah yang mengemuka;
	2. Diskusi bisnis model baru;
	3. Portofolio nasional;
	4. Kasus hukum
	5. <i>Derivatives (Target Redemption Forward dan lainnya);</i>
	6. Tresuri dan Pasar Modal, risiko pasar, likuiditas, dan ALCO;
	7. <i>Update</i> gempa bumi Padang & pandemik flu;
	8. Batas persetujuan kredit;
	9. Penentuan tanggal rapat berikutnya.
15 & 16 Desember 2009	1. Diskusi bisnis model baru;
	2. Batas persetujuan kredit;
	3. Persetujuan atas risalah rapat terakhir & masalah- masalah yang mengemuka;
	4. Portofolio nasional – <i>Derivatives (Target Redemption Forwards and others);</i>
	5. Transaksi dengan pihak terkait & <i>regulatory parameter</i> ;
	6. Kasus hukum;
	7. <i>Update</i> portofolio CMM;
	8. Tresuri dan Pasar Modal, risiko pasar, likuiditas, dan ALCO;
	9. Penentuan tanggal rapat berikutnya.

Selama tahun 2009, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Komite Pemantau Risiko melakukan rapat bulanan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, yaitu sebanyak 10 kali selama tahun 2009. Selain itu, Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan atas

potensi risiko yang dihadapi dan strategi usaha Perseroan; mengkaji mutu manajemen risiko, mengevaluasi kebijakan manajemen risiko beserta penerapannya; memantau dan mengevaluasi kinerja Unit Manajemen Risiko serta melaporkan hasil temuannya kepada Dewan Komisaris.

#### 4.4. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Perseroan telah menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko. Pedoman tersebut mengatur hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas/kewajiban anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan serta hal-hal yang mengatur etika. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko tersebut disusun berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia terutama peraturan Bank Indonesia tentang *Good Corporate Governance*. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko Perseroan ditinjau ulang secara berkala.

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

### 5. LAPORAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

#### 5.1. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi

Jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari 3 (tiga) orang Komisaris Independen, seorang Komisaris, dan seorang Pejabat Eksekutif Perseroan yang membawahi sumber daya manusia. Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh seorang Komisaris Independen. Perseroan melarang anggota Direksi untuk duduk di dalam keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan memiliki integritas, ahklak, dan moral yang baik. Komite Pemantau Risiko telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang terkait dengan persyaratan, keahlian, dan independensi anggota Komite.

#### Keanggotaan Komite Remunerasi & Nominasi

Nama	Jabatan	Keahlian
JB Kristiadi	Ketua/ Komisaris Independen	Keuangan/ Manajemen Risiko
Ng Kee Choe	Anggota/ Komisaris Utama	Kredit/ Keuangan,/ Sumber Daya Manusia,/ Tresuri/ Manajemen Risiko
Harry Sukadis	Anggota/Komisaris Independen	Akuntansi/IT/ Manajemen Risiko
Milan R Shuster	Anggota/Komisaris Independen	Kredit/ Keuangan / Manajemen Risiko
Maria Theodora <sup>1)</sup>	Anggota/Eksekutif	Sumber Daya Manusia

Catatan :

1) Merupakan pejabat eksekutif yang mengawasi Sumber Daya Manusia dan memiliki pengetahuan tentang peraturan nominasi dan remunerasi serta suksesi.

## 5.2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam lingkup kebijakan remunerasi, Komite wajib memperhatikan kinerja keuangan; pemenuhan cadangan; prestasi kerja individual; kewajaran dengan *peer group*; dan pertimbangan sasaran strategi jangka panjang Perseroan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Sekurang-kurangnya, Komite memiliki Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut:

- Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi:
  - a. Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
  - b. Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite
  - a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris

dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang saham:

- b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang dapat menjabat sebagai calon anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

## 5.3. Rapat dan Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2009, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat. Kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Komite adalah sebagai berikut:

Nama	Kehadiran dalam rapat
JB Kristiadi	4
Ng Kee Choe	4
Harry A.S. Sukadis	4
Milan R. Shuster	4
Maria Theodora	4

### Fokus kajian dari Komite Nominasi dan Remunerasi di tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kajian atas remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
2. Menetapkan *Key Performance Indicators* (KPI) bagi Direksi.
3. Menetapkan kriteria dan pemilihan Presiden Direktur.
4. Melakukan kajian mengenai perjanjian pengangkatan anggota Direksi baru.
5. Menseleksi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang baru, serta melakukan perubahan susunan keanggotaan dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
6. Melakukan kajian terhadap Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Komite Nominasi dan Remunerasi merekomendasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk melakukan kajian terhadap remunerasi Perseroan secara keseluruhan, termasuk setoran pajak penghasilan karyawan dengan menunjuk konsultan independen.

Agenda yang dibahas dalam rapat-rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan selama tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Tanggal Rapat	Agenda Utama
22 Januari 2009	1. <i>Update</i> Direktur Legal & Kepatuhan dan Direktur <i>Retail Banking</i> ;
	2. Diskusi tentang Eksekutif Senior;
	3. Diskusi/ rekomendasi LTCP;
	4. Pengunduran diri Kepala TCM & FI;
	5. Persetujuan untuk penunjukan Direktur TCM & FI;
	6. Diskusi tentang tantiem tahun 2007.
25 Mei 2009	1. Tantiem dan gaji/ honorarium Direksi dan Dewan Komisaris;
	2. Honorarium Dewan Pengawas Syariah;
	3. Honorarium Pihak Independen Komite Audit;
	4. Perhitungan pembayaran LTCP;
	5. Jumlah saham ditahan (Partisipan E/MSOP).
30 September 2009	1. Nominasi Kepala Treasuri dan Institusi Finansial;
	2. Nominasi Kepala <i>Corporate Banking</i> ;
	3. Nominasi Komisaris Utama Adira Quantum;
	4. Nominasi Direktur Adira Quantum;
	5. Nominasi Direktur Utama Sementara Adira Quantum.
15 Desember 2009	1. Nominasi anggota Dewan Komisaris Adira Finance

### 5.4. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi. Pedoman tersebut mengatur hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas/kewajiban anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta hal-hal yang mengatur etika.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut disusun berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia terutama peraturan Bank Indonesia tentang *Good Corporate Governance*. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi ditinjau ulang secara berkala.

## 6. LAPORAN KOMITE CORPORATE GOVERNANCE

### 6.1. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi

Meskipun pembentukan Komite *Corporate Governance* tidak diwajibkan oleh Bank Indonesia, Perseroan memutuskan bahwa adalah *prudent* dan pantas membentuk komite tersebut untuk mendukung komitmen Perseroan dalam menerapkan pelaksanaan *corporate governance* dalam kegiatan Perseroan dan pada seluruh jenjang organisasi.

Keanggotaan Komite <i>Corporate Governance</i>		
Nama	Jabatan	Keahlian
Manggi T. Habir	Ketua/Komisaris Independen	<i>Credit/Finance/Risk Management/Corporate Governance</i>
JB Kristiadi	Anggota/Komisaris Independen	<i>Finance/Risk Management</i>
Gan Chee Yen	Anggota/Komisaris	<i>Accounting/Finance/Risk Management</i>

### 6.2. Tugas dan Tanggungjawab Komite *Corporate Governance*

Komite *Corporate Governance* bertugas memenuhi dan menjalankan fungsi serta tanggung jawabnya, Komite memperhatikan penerapan prinsip-prinsip pelaksanaan proses tersebut dibawah ini, yaitu dengan cara:

- Bersama-sama dengan Direksi Perseroan mengembangkan dan berpartisipasi dalam proses penelaahan sistematis

permasalahan *corporate governance* dan tren yang terjadi dalam praktik *corporate governance* yang berpotensi mempengaruhi Perseroan serta dalam rangka meningkatkan efektifitas Komite.

- Melakukan fungsi-fungsi lain dan memiliki kewenangan yang dianggap baik dan perlu dalam menjalankan tanggung jawabnya.
- Melaporkan seluruh kegiatan Komite yang material kepada

Dewan Komisaris dari waktu ke waktu atau jika diminta oleh Dewan Komisaris melalui ketua Komite.

Komite memiliki kewenangan dan otoritas penuh dalam melakukan tanggung jawab utama sebagaimana disebut dibawah ini:

- Komite melakukan pertimbangan dan penilaian atas independensi Direktur Utama, independensi Komisaris, dan independensi Pihak Independen.
- Komite melakukan penilaian apakah mayoritas (51%) anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Hasil penilaian tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk didiskusikan lebih lanjut jika dianggap perlu.
- Komite menyusun prinsip-prinsip *corporate governance* untuk diterapkan di Perseroan dan secara periodik menelaah dan menilai kembali prinsip-prinsip tersebut beserta penerapannya, serta merekomendasikan perubahan yang dianggap perlu kepada Dewan Komisaris.

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

### 6.3. Rapat dan Program Kerja Komite

Selama tahun 2009, Komite *Corporate Governance* telah mengadakan 2 (dua) kali rapat:

Nama	Kehadiran dalam rapat
Manggi T. Habir	2
JB Kristiadi	2
Gan Chee Yen	2

Untuk tahun 2009, kegiatan utama Komite *corporate governance* adalah memastikan dipenuhinya transparansi *corporate governance* dalam Laporan Tahunan Perseroan; memastikan kepatuhan Perseroan atas semua Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum; dan mengkaji kebijakan yang terkait dengan *corporate governance* di Perseroan.

Agenda yang dibahas dalam rapat-rapat Komite *corporate governance* selama tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Tanggal Rapat	Agenda Utama
25 Mei 2009	1. Persetujuan atas risalah rapat terakhir & pembahasan masalah-masalah yang mengemuka;
	2. Laporan Pelaksanaan <i>Corporate Governance</i> ke BI;
	3. Laporan Tahunan;
	4. Tata Tertib/ <i>Charter</i> Komite Tata Kelola;
	5. <i>Corporate Policy Manual</i> ;
	6. Update Komite Anak Perusahaan & rencana aktivitas <i>Corporate Governance</i> tahun 2009;
	7. Direktur Kepatuhan yang baru;
	8. Audit BI yang sedang berlangsung;
	9. Penentuan tanggal rapat berikutnya.
13 Agustus 2009	1. Persetujuan atas risalah rapat terakhir & pembahasan masalah-masalah yang mengemuka;
	2. <i>Corporate Policy Manual</i> ;
	3. Hasil audit BI;
	4. Anak perusahaan;
	5. Akuisisi Adira & <i>capital injection</i> Adira Quantum;
	6. <i>Annual Report Awards</i> (ARA);
	7. Penentuan tanggal rapat berikutnya.

Laporan Komite Pemantau Risiko	Laporan Komite Nominasi & Remunerasi	Laporan Komite Corporate Governance	Direksi & Komite dibawah Direksi	Kepatuhan
Evaluasi & Manajemen Risiko	Pihak Terkait & Kredit	Rencana Strategis	Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan	Opsi Saham bagi Direksi & Karyawan Senior

#### 6.4. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite *Corporate Governance*

Komite *corporate governance* telah menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite *Corporate Governance*. Pedoman tersebut mengatur hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas/kewajiban anggota Komite *Corporate Governance* Perseroan serta hal-hal yang mengatur etika. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite *Corporate Governance* tersebut disusun berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite *Corporate Governance* Perseroan ditinjau ulang secara berkala.

### 7. DIREKSI

#### 7.1. Struktur, Komposisi, dan Independensi Direksi

Direksi dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Anggota Direksi berjumlah 9 (sembilan) orang dan keseluruhan anggota Direksi tersebut berdomisili di Indonesia. Setiap usulan mengenai penggantian/pengangkatan anggota Direksi Perseroan oleh Dewan Komisaris kepada Rapat

Umum Pemegang Saham telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Semua anggota Direksi Perseroan memiliki pengalaman sebagai Pejabat Eksekutif bank selama lebih dari lima (lima) tahun dan memiliki keahlian di bidang operasional perbankan. Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*). Anggota Direksi Perseroan tidak mendelegasikan kekuasaannya kepada pihak lain sehingga mengakibatkan beralihnya tugas dan fungsi. Anggota Direksi Perseroan tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direktur atau Pejabat Eksekutif di bank lain, perusahaan atau institusi lain kecuali menjalankan peran supervisi sebagai anggota Dewan Komisaris dalam anak perusahaan bukan bank yang dikendalikan oleh Perseroan.

Anggota Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Masing-masing anggota Direksi Perseroan tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lainnya maupun anggota Komisaris. Selain itu, seluruh anggota Direksi baik secara individu maupun kolektif tidak memiliki saham Perseroan maupun perusahaan lain yang melebihi 5% dari modal yang disetor; serta Sebastian Paredes, selaku Direktur Utama Perseroan, merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali Perseroan. Semua ini memenuhi kaidah *Good Corporate Governance*. Di bawah ini adalah daftar anggota Direksi Perseroan hingga akhir tahun 2009, berikut keterangan mengenai tanggal RUPS penunjukannya dan persetujuan Bank Indonesia.

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Uji Kemampuan dan Kelayakan Direksi				
Nama	Jabatan	Persetujuan Bank Indonesia	RUPS <sup>1)</sup>	Berakhir Pada
Sebastian Paredes <sup>3)</sup>	Direktur Utama	9 Mei 2005	3 April 2008	RUPS 2011
Jos Luhukay	Wakil Direktur Utama	5 Juni 2008	3 April 2008	RUPS 2011
Muliadi Rahardja	Direktur	21 Desember 1999	3 April 2008	RUPS 2011
Ali Yong	Direktur	8 Mei 2006	3 April 2008	RUPS 2011
Vera Eve Lim	Direktur	26 Juni 2006	3 April 2008	RUPS 2011
Sanjiv Malhotra <sup>4)</sup>	Direktur	26 Juli 2006	3 April 2008	RUPS 2011
Herry Hykmanto	Direktur	13 Mei 2008	3 April 2008	RUPS 2011
Kanchan Nijasure	Direktur	19 Juni 2008	3 April 2008	RUPS 2011
Fransiska Oei Lan Siem <sup>2)</sup>	Direktur Kepatuhan	11 Juni 2009	25 Mei 2009	RUPS 2011

Catatan:

- <sup>1)</sup> Merupakan RUPS pengangkatan kembali untuk seluruh anggota Direksi kecuali Fransiska Oei Lan Siem
- <sup>2)</sup> Fransiska Oei Lan Siem diangkat melalui RUPS Tahunan tanggal 25 Mei 2009 dan telah efektif melalui surat Bank Indonesia tanggal 11 Juni 2009 No. 11/74/GBI/DPIP/Rahasia.
- <sup>3)</sup> Pengunduran diri Sebastian Paredes akan menjadi efektif pada RUPS Perseroan tahun 2010
- <sup>4)</sup> Pengunduran diri Sanjiv Malhotra akan menjadi efektif pada RUPS Perseroan tahun 2010

### 7.2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan. Direksi mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku. Direksi Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor eksternal, hasil pengawasan

Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* Direksi Perseroan membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan. Direksi Perseroan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Direksi Perseroan mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. Direksi Perseroan menyediakan data dan

informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Selama tahun 2009, Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan, kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, dan dilengkapi oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya. Konsultan tersebut ditunjuk dari pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

### 7.3. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit dan Proper Test)

Semua anggota Direksi Perseroan memiliki integritas keuangan yang tinggi; kompetensi; reputasi dan pengalaman; serta berbagai keahlian, dan semuanya telah lulus uji kemampuan dan kepatutan Bank Indonesia.

### 7.4. Rapat Direksi

Direksi Perseroan bertugas menyusun kebijakan atau keputusan strategis melalui rapat Direksi. Pengambilan keputusan dalam rapat Direksi tersebut dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan akan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, ditandatangani ketua rapat/Direktur Utama, dan disampaikan kepada semua anggota Direksi, termasuk kepada anggota Direksi yang tidak menghadiri rapat. Pendapat tidak setuju dalam rapat dicatat dalam notulen rapat. Selama tahun 2009, Direksi telah menyelenggarakan 15 kali rapat dan tidak pernah terjadi *disenting opinion*.

#### Kehadiran pada Rapat Direksi

Nama	Kehadiran dalam Rapat Direksi (15 rapat)	Kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris (8 rapat)
Sebastian Paredes	15	8
Jos Luhukay	13	7
Muliadi Rahardja	15	7
Ali Yong	14	6
Vera Eve Lim	13	8
Sanjiv Malhotra	10	7
Herry Hykmanto	14	6
Kanchan Keshav Nijasure	13	7
Fransiska Oei	6	5

**Note:**

Fransiska Oei diangkat melalui RUPS tanggal 25 Mei 2009 dan telah efektif melalui surat Bank Indonesia tanggal 11 Juni 2009 No. 11/74/GBI/DPIP/Rahasia

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Agenda Yang Dibahas Dalam Rapat-Rapat Direksi Perseroan Selama Tahun 2009 Adalah Sebagai Berikut :

Tanggal Rapat	Agenda Utama
16 Januari 2009	1. Hak memesan efek terlebih dahulu /rights issue; 2. Adira call option.
6 Pebruari 2009	1. Hak memesan efek terlebih dahulu /rights issue.
11 Pebruari 2009	1. Tindakan lanjutan terkait dengan BCG Retail Bank.
18 Pebruari 2009	1. Tindakan lanjutan terkait dengan BCG Retail Bank.
11 Maret 2009	1. Update call option Adira; 2. Update Adira Quantum; 3. Update Derivatives (Target Redemption Forward dan lainnya);
19 Maret 2009	1. Stock option adjustment proposition.
8 April 2009	1. Update call option Adira; 2. Strategi penyelesaian terkait dengan derivatif.
6 Mei 2009	1. Call option Adira; 2. Diskusi EMSOP terkait dengan rights issue; 3. Diskusi Long-Term Compensation Plan (LTCP) terkait dengan rights issue; 4. Strategi Corporate Banking.
11 Mei 2009	1. Kasus hukum; 2. Update call option Adira; 3. Persiapan Rapat BoC, RUPS, dan RUPS LB.
22 Juni 2009	1. Update call option Adira.
29 September 2009	1. Derivatives (Target Redemption Forward dan lainnya)
01 Oktober 2009	1. Gempa bumi Sumatra Barat.
06 Oktober 2009	1. Rapat BI.
09 Desember 2009	1. Update SKAI; 2. Analisis dari CMM; 3. Rencana bisnis Bank 2010; 4. Permasalahan Derivatives (Target Redemption Forward dan lainnya); 5. Temuan BI; 6. Custodial Services.
17 Desember 2009	Hasil kajian Tata Kelola Konsultan Octagon.

### 7.5. Remunerasi Direksi

Anggota Direksi Perseroan tidak memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan. Anggota Direksi juga tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Total remunerasi Direksi Perseroan tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Remunerasi Direksi (Dinilai dalam ekivalen jutaan rupiah)				
	2009	2008	2007	2006
Gaji dan Tunjangan	39.221	39.301	24.322	28.199
Tantiem*	TBD	27.215	35.888	28.329
LTCP dibayarkan	-	11.834	-	-
Tunjangan lainnya dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya)				
a. dapat dimiliki	9.000	8.100	5.400	7.200
b. Tidak dapat dimiliki	6.358	6.036	4.352	5.773

\* Dibayarkan dalam tahun berikutnya

#### Notes:

1. Tantiem untuk Direksi tahun keuangan 2009 akan ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 29 April 2010
2. Di tahun 2007, Dewan Komisaris telah menyetujui pemberian Program Kompensasi Jangka Panjang (LTCP) kepada Direksi dan karyawan Bank yang memenuhi persyaratan. Program ini merupakan rencana 3 (tiga) tahunan yang dimulai pada tanggal 1 Juli 2007 dan terhutang pada tahun 2008, 2009, dan 2010. Pembayaran LTCP akan tergantung pada kinerja perusahaan yang telah ditetapkan dan peringkat kinerja perorangan. Penilaian kinerja perusahaan akan ditentukan oleh Dewan Komisaris, sementara kinerja perorangan akan ditentukan berdasarkan penilaian kinerja pada akhir tahun. Total LTCP yang akan dialokasikan kepada Direksi senilai Rp. 47,5 miliar untuk tahun 2008, 2009 dan 2010. Di tahun 2008, LTCP yang dibayarkan kepada Direksi sebesar Rp. 11,8 miliar.

Klasifikasi Remunerasi Direksi				
Jumlah remunerasi per orang dalam 1 tahun *)	2009	2008	2007	2006
Di atas 2 miliar	9	8	6	9
Di atas 1 miliar s.d 2 miliar	-	-	-	-
Di atas 500 juta s.d 1 miliar	-	-	-	-
500 juta ke bawah	-	-	-	-

\* yang diterima secara tunai

### 7.6. Pelatihan Anggota Direksi

Dalam rangka meningkatkan kompetensi, anggota Direksi Perseroan mengikuti berbagai program pelatihan, konferensi, seminar, dan/ atau *workshop*, baik yang diadakan secara internal maupun diselenggarakan oleh pihak independen. Anggota Direksi yang baru bergabung dengan Perseroan memperoleh *induction program* dalam pengenalan visi, misi, dan nilai-nilai Perseroan.

### 7.7. Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi Perseroan memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan pedoman tersebut bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Perseroan mengatur etika kerja, waktu kerja, serta pelaksanaan rapat dan ditinjau ulang secara berkala. Segala keputusan yang diambil sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

Hal-hal yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi antara lain bahwa anggota Direksi tidak boleh memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

mengurangi keuntungan Perseroan, anggota Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Perseroan disusun berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia terutama peraturan Bank Indonesia tentang *Good Corporate Governance*.

### 7.8. Komite-Komite di bawah Direksi

Direksi dibantu oleh 7 (tujuh) komite yang bertugas memberi saran dan rekomendasi terkait dengan kebijakan dan pengelolaan Perseroan. Komposisi keanggotaan komite disusun sesuai dengan kesulitan dan kompleksitas tugas dan tanggung jawab komite. Rekomendasi dari masing-masing komite dijadikan acuan oleh Direksi dalam mengambil keputusan. Partisipasi aktif Direktur Kepatuhan dalam komite-komite tersebut dilakukan dengan tetap menjaga independensinya, dengan demikian Direktur Kepatuhan dapat dan wajib menolak kebijakan maupun transaksi perbankan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Komite di bawah Direksi yang berjumlah 7 (tujuh) tersebut adalah:

1. Komite Risiko,
2. Komite Operasi,
3. Komite *Asset & Liability*,
4. Komite Pengarah Teknologi Informasi,
5. Komite Sumber Daya Manusia,
6. Komite *Business Executive*, dan
7. Komite *Fraud*.

## Keanggotaan Komite-komite di bawah Direksi

Anggota Direksi	Nama Komite						
	Komite Risiko	Komite Operasi	ALCO	Komite Pengarah Teknologi Informasi	Komite SDM	Komite Business Executive	Komite Fraud
Sebastian Paredes	√	√	√	√	√	√	
		(Ketua)	(Ketua)				
Joseph Luhukay	√	√		√	√		√
				(Ketua)			(Ketua)
Muliadi Rahardja	√	√		√	√		√
Sanjiv Malhotra	√	√	√	√		√	√
	(Ketua)						
Vera Eve Lim	√	√	√	√		√	
						(Ketua)	
Ali Yong	√	√			√		
					(Ketua)		
Herry Hykmanto	√	√	√			√	
Kanchan Nijasure		√		√			
Fransiska Oei		√					√

Tabel dibawah ini adalah rincian kehadiran anggota komite-komite tersebut di atas dalam rapat-rapat komite selama tahun 2009

Anggota Direksi	Tingkat Kehadiran dalam Rapat Komite-Komite di bawah Direksi (jumlah rapat)						
	Komite Risiko (10 kali rapat)	Komite Operasi (18 kali rapat)	ALCO (6 kali rapat)	Komite Pengarah Teknologi Informasi (1 kali rapat)	Komite SDM (5 kali rapat)	Komite Business Executive (8 kali rapat)	Komite Fraud (5 kali rapat)
Sebastian Paredes	2	12	5	1	5	7	
Joseph Luhukay		16		1	4		4
Muliadi Rahardja		17		1	4		4
Sanjiv Malhotra	7	13	4			6	2
Vera Eve Lim	1	13	1			5	
Ali Yong		17	5		5	8	2
Herry Hykmanto	4	16	6			7	
Kanchan Nijasure		17		1			
Fransiska Oei		11					2

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

### 7.8.1. Komite Risiko

Komite Risiko bertugas menetapkan rencana, arahan, kebijakan dan strategi manajemen risiko Perseroan dan anak-anak perusahaan; memastikan seluruh kegiatan Perseroan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku; mengevaluasi pelaksanaan proses manajemen risiko dan melaksanakan perbaikan-perbaikan yang sejalan dengan perubahan-perubahan eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi tingkat kecukupan modal Perseroan, tingkat modal anak perusahaan-perusahaan, serta profil risikonya; menentukan metodologi manajemen risiko yang paling sesuai untuk pengelolaan risiko; menentukan pembentukan cadangan melalui kebijakan untuk mengakomodasi potensi risiko yang *inherent* dan memastikan ketersediaan prosedur pemulihan dari bencana. Selain itu Komite juga bertugas mengevaluasi struktur organisasi risiko di Perseroan dan anak-anak perusahaan untuk memastikan bahwa proses-proses pengelolaan risiko sudah sesuai dengan perkembangan organisasi.

Agenda yang dibahas dalam rapat Komite Risiko selama tahun 2009 mencakup :

Tanggal Rapat	Agenda Utama
27 Januari 2009	1. Portofolio nasional; 2. Produk program; 3. CMM; 4. Adira Quantum; 5. <i>Corporate Banking</i> ; 6. Manajemen risiko operasional; 7. Kepatuhan; 8. Legal.
25 Maret 2009	1. Portofolio nasional; 2. SEMM; 3. Komersial; 4. <i>Asset based finance</i> ; 5. Produk program.
23 April 2009	1. Portofolio nasional; 2. Produk program; 3. Analisis risiko; 4. Syariah; 5. <i>Center of operational exellent</i> ; 6. Kepatuhan; 7. Legal.
28 Mei 2009	1. Portofolio nasional; 2. Produk program; 3. SEMM; 4. SKAI; 5. Analisis risiko; 6. Syariah; 7. SAM;
23 Juni 2009	1. Portofolio nasional; 2. Produk program; 3. Quantum; 4. CMM; 5. Analisis risiko.
28 Juli 2009	1. Portofolio nasional; 2. Produk program;

Tanggal Rapat	Agenda Utama
	3. Organisasi matrik risiko;
	4. Analisis risiko;
	5. TCM – perkembangan;
	6. Kartu kredit;
	7. ORM;
	8. Kepatuhan.
25 Agustus 2009	1. Portofolio nasional;
	2. Produk program;
	3. Analisis risiko;
	4. ORM;
	5. SEMM.
26 Oktober 2009	1 Portofolio nasional;
	2. Analisis risiko;
	3. ORM;
	4. Kepatuhan;
	5. Legal.
23 November 2009	1. Portofolio nasional;
	2. Produk program;
	3. Analisis risiko;
	4. SEMM;
	5. Kartu kredit.

### 7.8.2. Komite Operasi

#### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Operasi

- Mengawasi kinerja operasional Perseroan, hasil-hasil indikator kinerja utama dan tren-tren dalam Perseroan, serta segala hal atau kejadian signifikan Perseroan.
- Melakukan pengkajian atas kinerja historis maupun proyeksi kinerja keuangan Perseroan serta melakukan pengkajian segala hal yang dijadikan perhatian Komite yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan ataupun likuiditas Perseroan.
- Melakukan pengkajian dan merekomendasikan persetujuan terhadap panduan berinvestasi dan memberikan pinjaman.
- Melakukan pengkajian atas rencana pembiayaan Perseroan dan merekomendasi persetujuan atas penerbitan obligasi.
- Melakukan pengkajian dan memberikan rekomendasi kepada Direksi atas tindakan-tindakan yang terkait dengan pembagian dividen.
- Melakukan pengkajian atas anggaran operasional Perseroan.

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

- Melakukan pengkajian atas pengelolaan modal Perseroan.
- Melakukan pengkajian atas kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan pengkajian dan merekomendasikan untuk disetujui oleh Direksi seluruh kebijakan ataupun perubahan terhadap kebijakan yang masih berlaku pada saat ini terkait dengan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada, peraturan Bank Indonesia & Bapepam dan Undang-Undang Perseroan Terbatas lainnya serta melakukan review dan meninjau kepatuhan terhadap seluruh kebijakan dimaksud.
- Melakukan pengkajian atas hubungan Perseroan dengan para pemangku kepentingan utama.
- Melakukan pengkajian atas program penyertaan Perseroan.
- Melakukan pengkajian dan memantau kinerja program-program tanggung jawab sosial Perseroan.
- Melakukan pengkajian atas program-program asuransi Perseroan.
- Melakukan pengkajian atas hasil inspeksi dan evaluasi badan-badan pengawas eksternal seperti Bank Indonesia.
- Melakukan *Self Assessment* paling sedikit setahun sekali untuk menentukan efektifitas Komite.
- Melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab lain yang mungkin diberikan oleh Direksi kepada Komite dari waktu ke waktu.

Agenda yang dibahas dalam rapat Komite Risiko selama tahun 2009 mencakup:

Tanggal Rapat	Agenda Utama
7 Januari 2009*)	1. Tinjauan ekonomi makro; 2. <i>Update</i> bisnis; 3. Persiapan rapat BOC dan tindakan korporasi (RUPSLB).
14 Januari 2009	1. Masalah-masalah yang mengemuka di SDM; 2. <i>Update</i> SKAI.
28 Januari 2009	1. Laporan Danamon <i>Employee Opinion Survey</i> (DEOS); 2. Panduan <i>Performance Appraisal</i> (PA) & bonus; 3. <i>Legacy matters</i> .
4 Februari 2009*)	1. Tinjauan ekonomi makro; 2. <i>Update</i> bisnis; 3. <i>Update</i> OPEX 2008; 4. <i>Update</i> SDM.
11 Maret 2009	1. Tinjauan ekonomi makro; 2. Pertumbuhan pinjaman, biaya kredit dan NPL; 3. Hasil kinerja februari 2009; 4. <i>Non deal road show</i> ; 5. <i>Update</i> NCBS; 6. <i>Update</i> peraturan BI terbaru.
18 Maret 2009	1. Pengenalan calon Direktur Kepatuhan; 2. <i>Update</i> SKAI.
22 April 2009	1. Penilaian 360 derajat; 2. Presentasi SKAI; 3. Matriks Organisasi.

Tanggal Rapat	Agenda Utama
20 Mei 2009*)	1. Tinjauan ekonomi makro; 2. Dampak dari karakter pelanggan, kondisi ekonomi dan perkembangan nasabah pedesaan (BRI – Kupedas); 3. Penilaian 360 derajat; 4. Update SKAI; 5. Implementasi NCBS.
27 Mei 2009	1. Diskusi LTCP terkait dengan <i>rights issue</i> ; 2. Komunikasi kompensasi BoD.
3 Juni 2009	1. Presentasi <i>Octagon advisor</i> .
24 Juni 2009	1. Sumber daya manusia; 2. Update SKAI.
01 Juli 2009	1. Update Syariah; 2. Diskusi pegadaian.
15 Juli 2009	1. Diskusi Satuan Kerja.
29 Juli 2009	1. Permasalahan hukum; 2. <i>Coordination of branch &amp; system transformation (NCBS &amp; BCG Project)</i> ; 3. KUT terkini; 4. <i>Legacy matters</i> .
5 Agustus 2009	1. <i>Task force people management</i> ; 2. Update BCG.
12 Agustus 2009	1. Kinerja Finansial Juli; 2. Proyek IFRS; 3. Satuan Kerja <i>Cross Selling</i> ; 4. SKAI Terkini.
26 Agustus 2009	1. Konsolidasi cabang – Kantor Pusat; 2. Penilaian 360 derajat; 3. Lowongan posisi penting; 4. <i>Roadshow</i> ; 5. Kasus hukum; 6. Cayman Island; 7. Update batasan investasi.
2 September 2009	1. SKAI terkini; 2. Update <i>Derivatives (Target Redemption Forward dan lainnya)</i> ; 3. Adira Quantum & Adira Finance; 4. Lowongan posisi penting Terkini;

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Tanggal Rapat	Agenda Utama
	5. Prioritas program CEO;
	6. Laporan Komite SDM.
9 September 2009*)	1. Tren dan kesempatan dalam Perbankan;
	2. <i>Update</i> Perekenomian Asia;
	3. Dampak bisnis.
7 Oktober 2009*)	1. Satuan kerja <i>cross selling</i> ;
	2. Dampak bisnis;
	3. Diskusi bisnis model yang baru;
	4. Pengembangan kemampuan penagihan;
	5. Gempa bumi Padang;
	6. Asuransi <i>Bank Blanket Bond</i> (BBB);
	7. Asuransi <i>Directorship &amp; Officer</i> (D&O);
	8. Rencana SKAI 2010.
21 Oktober 2009	1. Penanganan PoA;
	2. Rencana SKAI 2010.
28 Oktober 2009*)	1. Rencana 2010 <i>first cut</i> ;
	2. Satuan Kerja <i>cross selling</i> ;
	3. Dampak bisnis;
	4. Satuan Kerja Manajemen Manusia ( <i>people management</i> ).
4 Nopember 2009	1. Pemantauan batasan produk treasuri;
	2. <i>Update</i> kustodian.

Catatan:

\*) Rapat gabungan antara Komite Operasi dan Komite Business Executive

### 7.8.3. Komite Asset & Liability

#### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Asset & Liability :

- Menetapkan ruang lingkup Komite, prosedur rapat, proses kerjanya dan membentuk sub komite untuk mendukung Komite;
- Menyetujui peraturan-peraturan Komite, strategi, obyektif, kepatuhan kerangka kerja dan panduan;
- Memastikan Perseroan dan anak perusahaan memiliki kecukupan likuiditas setiap waktu;
- Mengawasi dan mengantisipasi perubahan pada pasar lokal untuk kecukupan likuiditas;
- Memastikan Perseroan dan anak perusahaan memiliki modal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan persyaratan pemerintah;

- Menentukan peraturan untuk *capital hedging*, kenaikan modal dan pengelolaan modal;
- Melakukan diversifikasi pendanaan sesuai dengan sumber, jatuh tempo, mata uang dan instrumen, termasuk penjualan aset-aset;
- Mengatur neraca Perseroan dan anak perusahaan untuk memastikan bahwa strategi bisnis konsisten dengan kecukupan likuiditas, modal dan diversifikasi pendanaan;
- Menyetujui dan memeriksa kembali hal-hal sebagai berikut:
  1. Kerangka kerja likuiditas dan rasio,
  2. Kerangka kerja modal dan rasio,
  3. Kerangka kerja risiko pasar dan penggunaan limit,
  4. Likuiditas Asumsi Stress Test,
  5. Penggunaan asumsi aktual dalam proyeksi likuiditas.
- Menjalankan skenario analisis (faktor-faktor ekonomi dan politik);
- Menyetujui metodologi FTP, perubahan dan keputusan FTP untuk produk-produk baru;
- Mengawasi perjanjian-perjanjian keuangan dari semua *marketable securities* dan *debt issuances*;

Agenda yang dibahas dalam rapat Komite Asset & Liability selama tahun 2009 mencakup:

Tanggal Rapat	Agenda Utama
20 Januari 2009	1. <i>Update</i> dari rapat ALCO sebelumnya; 2. <i>Update</i> dan pandangan ekonomi; 3. <i>Update</i> Interbank.
18 Februari 2009	1. <i>Update</i> dari rapat ALCO sebelumnya; 2. <i>Update</i> dan pandangan ekonomi; 3. Analisis skenario.
18 Maret 2009	1. <i>Update</i> dari rapat ALCO sebelumnya; 2. <i>Update</i> dan pandangan ekonomi; 3. Analisis skenario; 4. Tinjauan neraca dan rasio; 5. Risiko pasar & likuiditas.
22 April 2009	1. <i>Update</i> dari rapat ALCO sebelumnya; 2. <i>Update</i> dan pandangan ekonomi; 3. Analisis skenario; 4. Tinjauan neraca dan rasio; 5. Risiko pasar & likuiditas.
20 Mei 2009	1. <i>Update</i> dari rapat ALCO sebelumnya; 2. Analisis Skenario; 3. Tinjauan Neraca & rasio; 4. <i>Update Middle office</i> ; 5. Risiko pasar dan likuiditas.

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

### 7.8.4. Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI)

#### Tugas dan Tanggung jawab KPTI :

- Sehubungan dengan Rencana Strategis Bisnis Perseroan, secara berkala mengkaji strategi IT Perseroan, termasuk *roadmap* bersamaan dengan sumber daya dan keuntungan yang dipersyaratkan. Mengevaluasi dan menyetujui perubahan-perubahan di area ini sesuai dengan kebutuhan Perseroan.
- Membuat Kebijakan IT seperti Kebijakan Keamanan IT dan Kebijakan Manajemen Risiko IT.
- Memastikan agar proyek IT dan Rencana strategis IT sejalan dan memastikan prioritasnya.
- Secara berkala mengkaji indikator tingkat layanan sistem produksi Perseroan termasuk Keefektifan kebijakan keamanan, menanggulangi jika terdapat persoalan dan merekomendasikan perbaikan-perbaikan
- Mengkaji dan menyetujui investasi teknologi dalam konteks strategi, blueprint, prioritas dan *roadmap* IT Perseroan. Mendefinisikan dan mengimplementasikan persetujuan panduan investasi teknologi, PAM dan beban operasi IT sehingga konsisten dengan kebijakan pengadaan.

- Memantau perkembangan proyek inti IT Perseroan dengan arahan dari masing-masing Komite Pengarah Proyek Teknologi Informasi, menanggulangi setiap permasalahan dan merekomendasikan perbaikan-perbaikan yang dapat dilakukan. Perbaikan-perbaikan tersebut akan diimplementasikan oleh tim proyek.
- Mengkaji keefektifan Rencana Mitigasi Risiko atas pelaksanaan investasi IT beserta memastikan kontribusi investasi terhadap bisnis Perseroan.
- Memastikan alokasi sumber IT yang tepat dan baik. Jika diperlukan untuk menggunakan pihak ketiga untuk membantu pelaksanaan implementasi proyek, KPTI harus memastikan

adanya kebijakan dan prosedur untuk pelaksanaan proses memilih dan menunjuk pihak ketiga tersebut.

- Mengkaji secara rutin manfaat yang diberikan oleh proyek-proyek IT Perseroan kepada berbagai unit bisnis dan fungsi support.
- Mengkaji secara rutin beban operasi dan investasi teknologi IT Perseroan.
- Melakukan Self Assessment paling tidak setahun sekali untuk menentukan apakah KPTI berfungsi efektif.
- Melakukan tugas dan tanggung jawab lainnya yang dilimpahkan oleh Direksi dari waktu ke waktu.

Agenda yang dibahas dalam rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi selama tahun 2009 mencakup:

Tanggal Rapat	Agenda Utama
25 Maret 2009	1. Perbaikan Pedoman dan Tata Tertib Kerja / <i>Charter</i> ;
	2. Persetujuan kebijakan IT ;
	3. Persetujuan proyek EMV.

### 7.8.5. Komite Sumber Daya Manusia

#### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sumber Daya Manusia :

- Memberikan arahan strategi di bidang Sumber Daya Manusia, membuat kebijakan umum di bidang Sumber Daya Manusia, antara lain pada bidang-bidang sebagai berikut:
  1. Kebijakan umum tentang ketenaga kerjaan
  2. Kompensasi dan benefit karyawan
  3. Manajemen Penilaian Kinerja
  4. Manajemen Talenta
  5. Struktur Organisasi dan jenjang kepegangatan
  6. Pelatihan dan Pengembangan Karyawan
  7. Pengembangan budaya perusahaan
  8. Pengembangan iklim kerja yang baik

Agenda yang dibahas dalam rapat Komite Sumber Daya Manusia selama tahun 2009

Tanggal Rapat	Agenda Utama
15 Januari 2009	Persetujuan panduan penyesuaian gaji dan bonus untuk PA akhir tahun 2008.
24 Pebruari 2009	Persetujuan 2008 bonus <i>pool</i> , penyesuaian gaji tahun 2009 dan promosi.
13 Agustus 2009	1. Persetujuan permohonan gaji dan penyesuaian grade; 2. Keputusan LTCP dan <i>resignation allowance accruals</i> ; 3. Keputusan untuk <i>secondment policy</i> .
6 Oktober 2009	1. Diskusi atas <i>feedback</i> dan input produk LTCP; 2. Diskusi dan keputusan untuk asumsi budget biaya Sumber Daya Manusia 2010.
11 Desember 2009	1. Diskusi panduan penyesuaian gaji dan bonus; 2. Diskusi panduan PA dan masalah-masalah lain.

9. Pengembangan hubungan karyawan dan Perseroan.
10. Penyelarasan kebijaksanaan dan sinergi sumber daya manusia dengan anak perusahaan
11. Penunjukkan pejabat eksekutif dan perencanaan suksesi

- Melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab lain yang mungkin diberikan oleh Direksi kepada Komite SDM, dari waktu ke waktu.
- Menyampaikan risalah rapat kepada Direksi.

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

### 7.8.6. Komite *Business Executive*

#### Tugas dan Tanggung Jawab Komite *Business Executive* :

- Menelaah kondisi pasar, keadaan perekonomian, tren-tren industri dan *positioning* pesaing.
- Memonitor bisnis dan kinerja keuangan Perseroan terhadap latar belakang kondisi eksternal.
- Mengkaji kinerja pendapatan bisnis Perseroan dan mengkaji hal-hal lain yang disampaikan kepada Komite yang dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan secara keseluruhan yang meliputi pendapatan bunga, pendapatan operasional dan pendapatan jasa.
- Mengkaji dan mendefinisikan untuk keperluan Perseroan *revenue drivers* jangka menengah/ panjang.
- Mengkaji dan merekomendasikan persetujuan strategi *cross marketing* termasuk kombinasi produk yang diminati, inisiatif *cross selling*, rencana akuisisi nasabah dan rencana pendayagunaan tenaga pemasaran.
- Mengkaji, mendefinisikan dan mengklarifikasi untuk Perseroan apa yang disebut dengan "*unique value proposition*" untuk pelanggan Perseroan atas segala inisiatif terkait dengan pendapatan yang dilakukan oleh Komite.
- Mengkaji secara terus menerus perubahan-perubahan peraturan yang mungkin mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
- Membahas hal-hal lain yang dapat berpengaruh atau memiliki akibat terhadap pendapatan Perseroan.

Agenda yang dibahas dalam rapat Komite *Business Executive* selama tahun 2009 mencakup:

Tanggal Rapat	Agenda Utama
25 Maret 2009	1. Pandangan makro ekonomi; 2. Pencanaan Pusat Layanan Bersama ( <i>shared services</i> ); 3. Pencapaian CSR tahun 2008.
15 April 2009	1. Pandangan makro ekonomi; 2. Prioritas Strategis Tahun 2009: Meningkatkan Efisiensi dan Sinergi antar Unit Bisnis dan antar Kantor Wilayah; 3. Tinjauan atas Industri Sepeda Motor di Indonesia.
29 April 2009	1. Pandangan makro ekonomi; 2. <i>Update</i> 10 Bank Terbesar; 3. <i>Update</i> beban operasi kuartal pertama tahun 2009; 4. Konsolidasi rasio beban terhadap pendapatan; 5. Tinjauan beban operasional; 6. Segmentasi rasio beban terhadap pendapatan.
11 Juni 2009	1. Pandangan makro ekonomi; 2. <i>Update</i> Forum CEO Perbankan Asia; 3. <i>Update non deal roadshow</i> ; 4. <i>Update</i> 10 Bank Terbesar.
25 Juni 2009	1. Pandangan makro ekonomi; 2. <i>Update</i> bisnis.
12 Agustus 2009	1. Pandangan ekonomi makro; 2. <i>Update</i> bisnis.
11 Nopember 2009	1. Pandangan makro ekonomi; 2. Keuangan Gugus Tugas <i>supply chain</i> ; 3. Relokasi alokasi biaya tahun 2010- diskusi kedua; 4. <i>Update</i> bisnis.
25 Nopember 2009	1. Pandangan makro ekonomi; 2. Gugus tugas <i>cross sell</i> langkah ke 4 <i>wallet sizing</i> , model bisnis dan keuangan; 3. <i>Update</i> 10 Bank Terbesar.
3 Desember 2009	1. <i>Update</i> rencana Danamon tahun 2010 putaran ke 2; 2. <i>Update</i> FTP.

### 7.8.7. Komite *Fraud*

Tugas dan tanggung jawab Komite *Fraud* adalah memutuskan sanksi bagi setiap pekerja Perseroan yang melakukan atau terlibat dalam *fraud*. Dalam menjalankan Tugas dan Tanggung jawabnya, Komite *Fraud* juga berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan Perseroan dan/atau Perjanjian Kerja Bersama dan/atau Kode Etik dan/atau Nilai Budaya Perseroan. Dalam hal terjadinya *fraud*, Komite *Fraud* juga berkewajiban untuk segera melihat proses kerja dan kontrol yang ada untuk mengambil langkah-langkah preventif maupun perbaikan yang perlu untuk mencegah terulangnya *fraud*.

Agenda yang dibahas dalam rapat Komite *Fraud* selama tahun 2009 mencakup:

Tanggal Rapat	Agenda Utama
18 Maret 2009	Keputusan kasus-kasus <i>fraud</i> : 1. Personal Banking cabang Su ngguminasa - Sulawesi Selatan; 2. SEMM cabang Pasar Cerme – Purwokerto; 3. SEMM Pasar Johar & Pasar Peterong – Semarang; 4. CREM Kantor Pusat.
5 Mei 2009	Keputusan kasus-kasus <i>fraud</i> : 1. Danamon card business; 2. SEMM Pasar Sohar & Pasar Peterong, Semarang; 3. CREM Kantor Pusat.
1 Juni 2009	Keputusan kasus-kasus <i>fraud</i> : 1. Danamon SEMM Pasar Cijerah; 2. Cabang Pemuda branch, Semarang – Jawa Tengah; 3. CREM Kantor Pusat.
5 Agustus 2009	Keputusan kasus-kasus <i>fraud</i> : • Personal Banking cabang Jember – Jawa Timur; • DSP SEMM Kijang, kluster Batam; • DSP SEMM Pasar Besar, Madiun- Jawa Timur; • DSP SEMM Pasar Kuala Tungkal, Jambi; • Pemuda branch, Semarang- Jawa Tengah.
11 Nopember 2009	Keputusan pemulihan sehubungan dengan kerugian nasabah: Personal Banking cabang Jember – Jawa Timur.

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

### 8. KEPATUHAN

#### 8.1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Selain sumber daya manusia, aset paling berharga bagi sebuah bank adalah reputasi. Dengan perubahan dan gejolak yang terus menerpa iklim usaha perbankan saat ini, tidak dapat diabaikan pentingnya menjaga reputasi yang baik. Atas dasar ini, fungsi kepatuhan di Perseroan menjadi amat penting untuk mendukung pengelolaan risiko kepatuhan agar sesuai dengan perkembangan usaha Perseroan, termasuk membangun kesadaran bahwa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan tidak hanya berakibat pada teguran dari pihak regulator, melainkan juga bisa menimbulkan publikasi negatif yang dapat mencemarkan reputasi Perseroan.

Selain itu, sesuai dengan karakteristik bisnis perbankan, Perseroan perlu mengantisipasi secara baik segala risiko yang berhubungan dengan produk dan jasa, khususnya mengenai kemungkinan digunakannya produk dan jasa Perseroan sebagai sarana pencucian uang atau pendanaan bagi kegiatan terorisme sehingga menyebabkan ancaman bagi kelangsungan usaha Perseroan.

Sasaran utama dari implementasi kepatuhan adalah memastikan dan secara berkesinambungan

memberikan arahan kepada masing-masing unit organisasi di Perseroan untuk memenuhi peraturan, hukum dan standar yang berlaku, serta mematuhi etika dan tata kelola Perseroan. Fungsi Kepatuhan pada akhirnya bertujuan untuk mengembangkan budaya kepatuhan, sehingga Perseroan mampu mencapai kinerja dengan reputasi yang baik.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999, Direktur Kepatuhan bertanggungjawab untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam aktifitas bisnis Perseroan. Direktur Kepatuhan juga bertanggungjawab untuk menyusun dan mengimplementasikan system kepatuhan yang efektif dan terintegrasi dalam Perseroan. Melalui Unit Kepatuhan, pengembangan budaya kepatuhan pada seluruh jenjang organisasi dilakukan secara berkesinambungan. Direktur Kepatuhan juga memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama setiap bulan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

Merujuk pada Surat Keputusan Direksi No. DIR-COMP.112 tanggal 28 Oktober 2002, kerangka operasional kepatuhan tertuang dalam bentuk manual kepatuhan dan standar prosedur operasional kepatuhan. Direksi telah mengkomunikasikan seluruh kebijakan pedoman system dan prosedur tersebut kepada seluruh satuan kerja organisasi. Direksi menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif melalui penetapan organisasi Unit Kepatuhan secara formal. Untuk mewujudkan komitmen yang tinggi terhadap kepatuhan. Direksi mencanangkan kepatuhan sebagai bagian dari budaya kerja perusahaan di seluruh satuan kerja organisasi sebagaimana tercantum dalam standar kode etik Perseroan.

#### 8.2. Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan meliputi:

- Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan bahwa Perseroan telah memenuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sejalan dengan prinsip kehati-hatian Perseroan;
- Memantau dan meminimalisasi terjadinya penyimpangan;
- Memantau dan menjaga standar kepatuhan Perseroan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat

Laporan Komite Pemantau Risiko	Laporan Komite Nominasi & Remunerasi	Laporan Komite Corporate Governance	Direksi & Komite dibawah Direksi	Kepatuhan
<p>Evaluasi &amp; Manajemen Risiko</p> <p>oleh Perseroan kepada Bank Indonesia;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun dan penyempurnaan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.</li> </ul> <p>Dalam rangka menerapkan fungsi kepatuhan bank terhadap peraturan Bank Indonesia maupun perundang undangan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian, Direktur Kepatuhan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan uji kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur dan produk program yang akan diterbitkan dan pemberian kredit yang perlu mendapat persetujuan dari direksi.</li> <li>Memantau rasio regulatory parameter dan penyampaian laporan sesuai ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.</li> <li>Melakukan pemantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen terhadap Bank Indonesia termasuk mengawasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Bank Indonesia.</li> </ul>	<p>Pihak Terkait &amp; Kredit</p>	<p>Rencana Strategis</p> <p>Sesuai SK Direksi No. DIR-COMP.112 tanggal 28 Oktober 2002 telah ditetapkan bahwa tugas dari Direktur Kepatuhan adalah melakukan pengawasan secara ex ante dengan cara mencegah manajemen bank untuk tidak menempuh kebijakan dan/atau keputusan mengenai transaksi penting yang mengandung unsur ketidakpatuhan. Pencegahan dimaksud dapat dilakukan pada forum rapat direksi/komisaris maupun proses uji kepatuhan.</p> <p>Adapun tugas Unit Kepatuhan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mendesain dan menyediakan database peraturan-peraturan eksternal yang dapat diakses oleh seluruh karyawan melalui intranet (e-manual);</li> <li>Mendistribusikan peraturan yang diterbitkan dan mensosialisasikannya kepada unit-unit organisasi terkait;</li> <li>Melaporkan hasil uji kepatuhan dan melakukan analisis atas pengimplementasian kepatuhan;</li> </ul>	<p>Transparansi Kondisi Keuangan &amp; Non Keuangan</p>	<p>Opsi Saham bagi Direksi &amp; Karyawan Senior</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan kajian terhadap kebijakan, transaksi dan produk, termasuk hal-hal yang berkenaan dengan implementasi Corporate Governance;</li> </ul> <p>Hasil pelaksanaan tugas kepatuhan ini dilaporkan secara berkala dalam tiap semester oleh Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia. Selanjutnya, hal-hal yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku atau belum memenuhi prinsip kehati-hatian akan terus dimonitor tindak lanjutnya dan kepatuhan jadwal pelaksanaannya. Implementasi kepatuhan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemenuhan atas peraturan yang berlaku</li> <li>Menjadi bagian tak terpisahkan dari standar tata kelola yang baik</li> <li>Didasarkan pada kompetensi dan integritas karyawan.</li> <li>Menjadi satu kesatuan yang melekat dengan proses bisnis.</li> </ul>

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

### 8.3. Kepatuhan terhadap Regulasi Utama

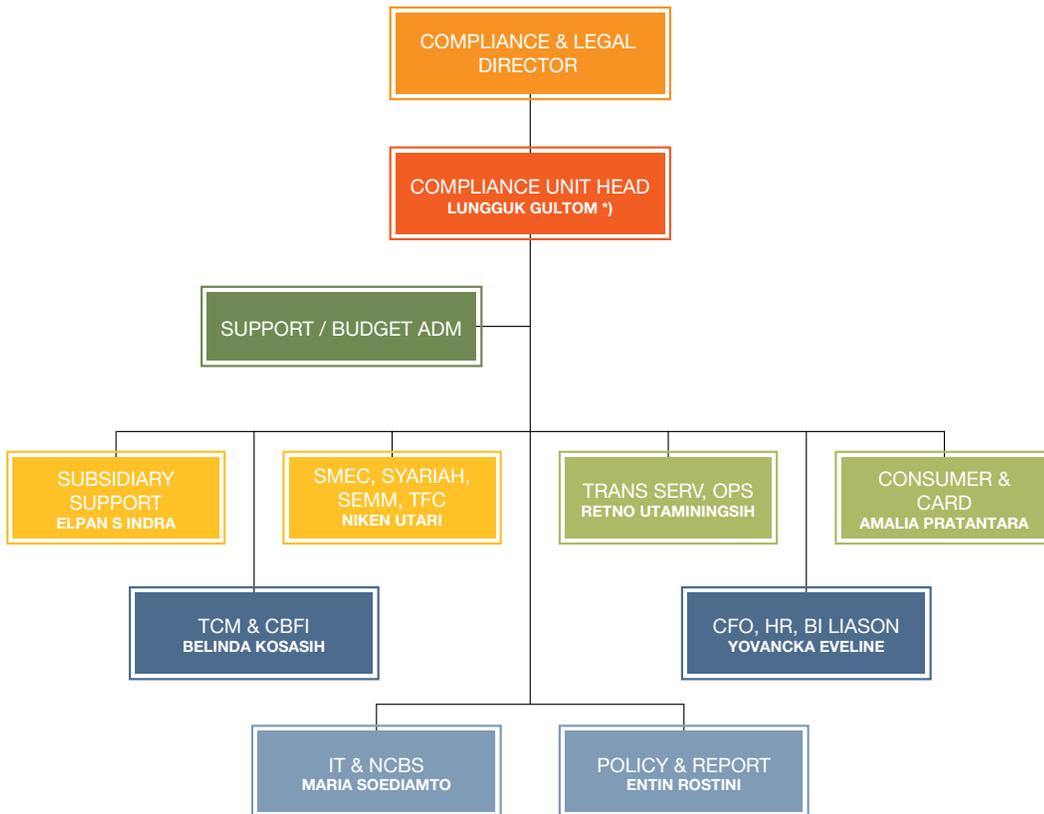
Perihal	Status	Catatan
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	terpenuhi	CAR Perseroan per 31 Desember 2009 sebesar 20,7 % (dengan <i>market dan credit risk charge</i> ), telah melampaui persyaratan minimum Bank Indonesia sebesar 8%
Giro Wajib Minimum (GWM Rupiah)	terpenuhi	Persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM Rupiah) per 31 Desember 2009 terpenuhi sebesar 5,11% (Utama) dan 15.59% (Sekunder)
Kredit Bermasalah (NPL)	terpenuhi	Rasio Gross NPL per 31 Desember 2009 sebesar 4,6%. Net NPL mencapai 2,4%.
Net Open Position (NOP)	terpenuhi	NOP per 31 Desember 2009 sebesar 4,15 %, di bawah batasan maksimum regulasi Bank Indonesia sebesar 20% modal.
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	terpenuhi	Selama tahun 2009 tidak terjadi pelampauan maupun pelanggaran BMPK baik terhadap debitur individu atau kelompok.
Anti Pencucian Uang	terpenuhi	Perseroan telah mengikuti peraturan Bank Indonesia. Pelatihan khusus telah dilaksanakan ke unit bisnis dan unit pendukung untuk mengenali dan mencegah transaksi Pencucian Uang.
Portofolio Investasi	terpenuhi	Total investasi Perseroan tidak melebihi batas maksimum 25% dari modal sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia

### 8.4. Kegiatan Kepatuhan Tahun 2009

Kegiatan kepatuhan di tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan penerapan fungsi kepatuhan untuk anak perusahaan dengan cara melakukan monitoring regulatory parameter, memberikan masukan dan mengkaji ulang program – program gabungan antara bank dan anak perusahaan
- Menyempurnakan *Standard Operating Procedure* (SOP) Compliance dan mendistribusikannya kepada semua divisi terkait
- Mensosialisasikan peraturan –peraturan baru kepada semua unit terkait dan menindaklanjuti langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dimaksud.
- Menyempurnakan modul pelatihan kepatuhan, termasuk persiapan E-Learning bekerjasama dengan DCU (Danamon Corporate University)
- Memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengkoordinasikan Self Assessment secara kuartal atas peringkat kesehatan Perseroan.
- Melakukan penambahan staf kepatuhan guna lebih memperkuat Tim Kepatuhan.

**STRUKTUR ORGANISASI KEPATUHAN**



\*) Per tanggal 01 Januari 2010 digantikan oleh Sdri. Pey Fang Ong

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

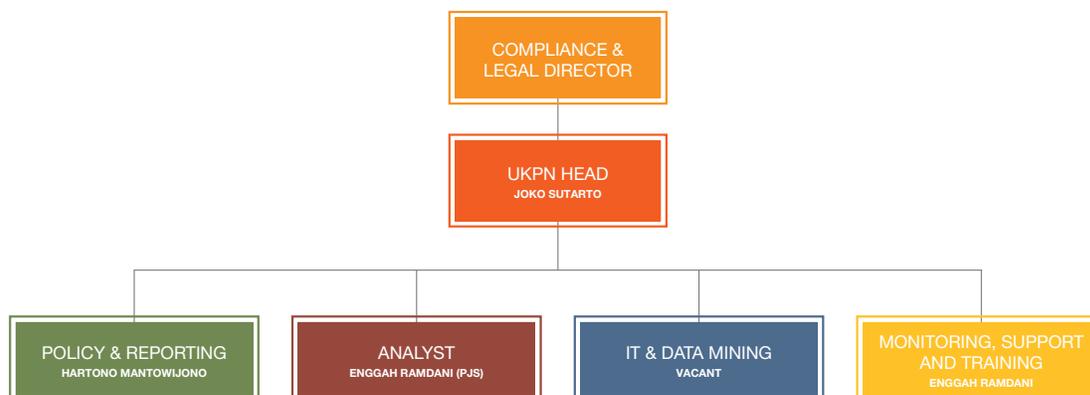
### 8.5. Implementasi Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)]

Perseroan secara berkelanjutan terus berupaya meningkatkan penerapan Program APU dan PPT (atau sebelumnya dikenal sebagai Prinsip Know Your Customer/KYC) , antara lain melalui penyempurnaan organisasi, pengembangan kebijakan dan sistem informasi, pelaksanaan program pelatihan dan sosialisasi kepada karyawan, maupun inisiatif-inisiatif lainnya. Berikut adalah beberapa inisiatif yang telah dilakukan terkait dengan APU dan PPT selama tahun 2009:

#### 8.5.1. Organisasi

Mulai Semester 2 tahun 2009, Perseroan telah melakukan reorganisasi terhadap Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) dengan memisahkan UKPN dari Divisi Kepatuhan sebagai Divisi tersendiri, menambah jumlah staf UKPN serta menggabungkan unit Surveillance yang semula berada di bawah supervisi Operation ke UKPN. Reorganisasi tersebut diharapkan dapat mendukung Perseroan dalam upayanya untuk melaksanakan UU TPPU serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Program APU dan PPT lainnya secara lebih efektif.

### STRUKTUR ORGANISASI UKPN



Laporan Komite Pemantau Risiko	Laporan Komite Nominasi & Remunerasi	Laporan Komite Corporate Governance	Direksi & Komite dibawah Direksi	Kepatuhan
<p><b>8.5.2. Pelatihan dan Sosialisasi.</b> Selama tahun 2009, Perseroan telah memberikan pelatihan dan sosialisasi KYC/APU dan PPT yang berkesinambungan kepada para karyawannya, antara lain melalui pelatihan induksi bagi karyawan baru, refreshment bagi karyawan (khususnya frontliners) yang sebelumnya telah pernah mendapatkan pelatihan, maupun sosialisasi ke cabang dan unit kerja. Pelatihan dan sosialisasi dilakukan melalui koordinasi antara HR Department dan UKPN. Selama tahun 2009, sejumlah 4.447 karyawan telah mendapatkan pelatihan di bidang KYC/APU dan PPT.</p> <p><b>8.5.3. Pemantauan atas Kelengkapan Data Nasabah.</b> Pemantauan terhadap kelengkapan data nasabah dilakukan setiap bulan, bekerja sama dengan unit bisnis terkait. Sampai dengan bulan Desember 2009, sebanyak 99,89% dari total CIF Bank telah memenuhi kelengkapan field-field yang diwajibkan.</p> <p><b>8.5.4. Pelaporan</b> Sebagai pelaksanaan dari UU TPPU dan ketentuan Bank Indonesia terkait, selama tahun 2009 Perseroan telah mengirimkan 52 Laporan</p>	<p>Transaksi Keuangan Mencurigakan (Suspicious Transaction Report/STR) kepada PPATK. Dalam periode yang sama, Perseroan juga telah mengirimkan 143.518 Laporan Transaksi Keuangan Tunai (Cash Transaction Report/CTR) kepada PPATK. Selain itu, sebagai tanggapan atas permintaan data dan informasi dari pihak ekstern, Perseroan telah menyampaikan 124 surat kepada PPATK, KPK, BI, Kepolisian dan pihak ketiga lainnya.</p> <p><b>8.5.5. Evaluasi Kebijakan dan Prosedur</b> Menindaklanjuti penerbitan PBI No. 11/28/2009 tentang Penerapan Program APU dan PPT bagi Bank Umum serta Surat Edaran (SE) No. 11/31/DPNP tentang Pedoman Standar Penerapan Program APU dan PPT bagi Bank Umum, Perseroan telah memulai proses penyusunan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT Bank yang disesuaikan dengan PBI dan SE tersebut. Proses review dilakukan terhadap formulir-formulir transaksi yang digunakan, antara lain formulir aplikasi pembukaan rekening dan formulir transfer. Sebagai langkah sosialisasi,</p>	<p>Transaksi Keuangan Mencurigakan (Suspicious Transaction Report/STR) kepada PPATK. Dalam periode yang sama, Perseroan juga telah mengirimkan 143.518 Laporan Transaksi Keuangan Tunai (Cash Transaction Report/CTR) kepada PPATK. Selain itu, sebagai tanggapan atas permintaan data dan informasi dari pihak ekstern, Perseroan telah menyampaikan 124 surat kepada PPATK, KPK, BI, Kepolisian dan pihak ketiga lainnya.</p>	<p>Transparansi Kondisi Keuangan &amp; Non Keuangan</p>	<p>Opsi Saham bagi Direksi &amp; Karyawan Senior</p> <p>materi pelatihan KYC telah disesuaikan dengan revisi yang dimaksud. Materi APU dan PPT telah direvisi sesuai dengan peraturan dan Surat Edaran yang dimaksud.</p> <p>Perseroan telah menyampaikan action plan atas pelaksanaan program APU dan PPT dalam laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan pada bulan Desember 2009 yang disampaikan kepada Bank Indonesia.</p> <p><b>8.5.6. Sistem Manajemen Informasi</b> Untuk meningkatkan efektifitas pemantauan atas laporan pada aplikasi PDS yang sebelumnya digunakan cabang untuk memonitor transaksi nasabah, aturan yang ditetapkan pada laporan tersebut telah diimplementasikan melalui Surveillance System (SS) di kantor pusat dan mulai efektif dilaksanakan sejak bulan Oktober 2009.</p> <p>Perseroan juga telah mengimplementasikan aplikasi pelaporan CTR (Cash Transaction Report) berbasis web (CTR-Web) di 7 cabang.</p>

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

### 9. SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL (SKAI)

#### 9.1. Audit Internal

SKAI merupakan fungsi independen yang melapor langsung kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit, termasuk di dalam tugasnya adalah memberi keyakinan yang independent dan obyektif serta memberikan jasa konsultasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk memaksimalkan dan menjaga nilai pemegang saham. Selain itu, juga berfungsi membantu Direksi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola. SKAI bertekad menjadi mitra usaha yang dapat memberikan nilai tambah dalam mendorong budaya kontrol yang kuat untuk memungkinkan Perseroan dan anak perusahaan mencapai tujuan jangka panjang dengan merujuk kepada international best practice.

Sesuai dengan Internal Audit Charter yang telah ditanda tangani oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris, Audit Internal memiliki akses yang tidak terbatas atas seluruh kegiatan, fungsi, catatan, properti dan personil dari Perseroan dan anak perusahaan. Ruang lingkup Audit Internal meliputi seluruh entitas audit di Perseroan dan PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk; PT Asuransi Adira Dinamika; dan PT Adira Quantum Multi Finance.

Dalam memberikan penilaian atas kecukupan dan efektifitas proses dalam mengendalikan dan mengelola risiko, SKAI melaporkan temuan audit yang signifikan dan berhubungan dengan proses pengendalian kegiatan perusahaan termasuk rekomendasi atas proses tersebut dan melakukan tindak lanjut atas perbaikan proses. Setiap bulan, ringkasan temuan audit dipresentasikan kepada Dewan Direksi dan Manajemen dan disampaikan dalam setiap rapat Komite Audit.

Dalam melaksanakan fungsinya, SKAI merujuk pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dari Bank Indonesia dan International Standards for the Professional Practice of Internal Audit dari The Institute of Internal Auditors.

#### 9.2. Kegiatan Utama Tahun 2009

Selama tahun 2009, SKAI telah mengaudit 507 obyek pemeriksaan, dengan perincian sebagai berikut:

1. 58 audit terhadap entitas kantor pusat,
2. 230 entitas cabang, dan
3. 219 Danamon Simpan Pinjam/ DSP (termasuk 69 cluster SEMM, 139 unit SEMM dan 11 Consumer Mass Market/ CMM Credit Factory).

SKAI telah mencapai 102% target kerja dari rencana audit yang telah ditetapkan pada tahun 2009.

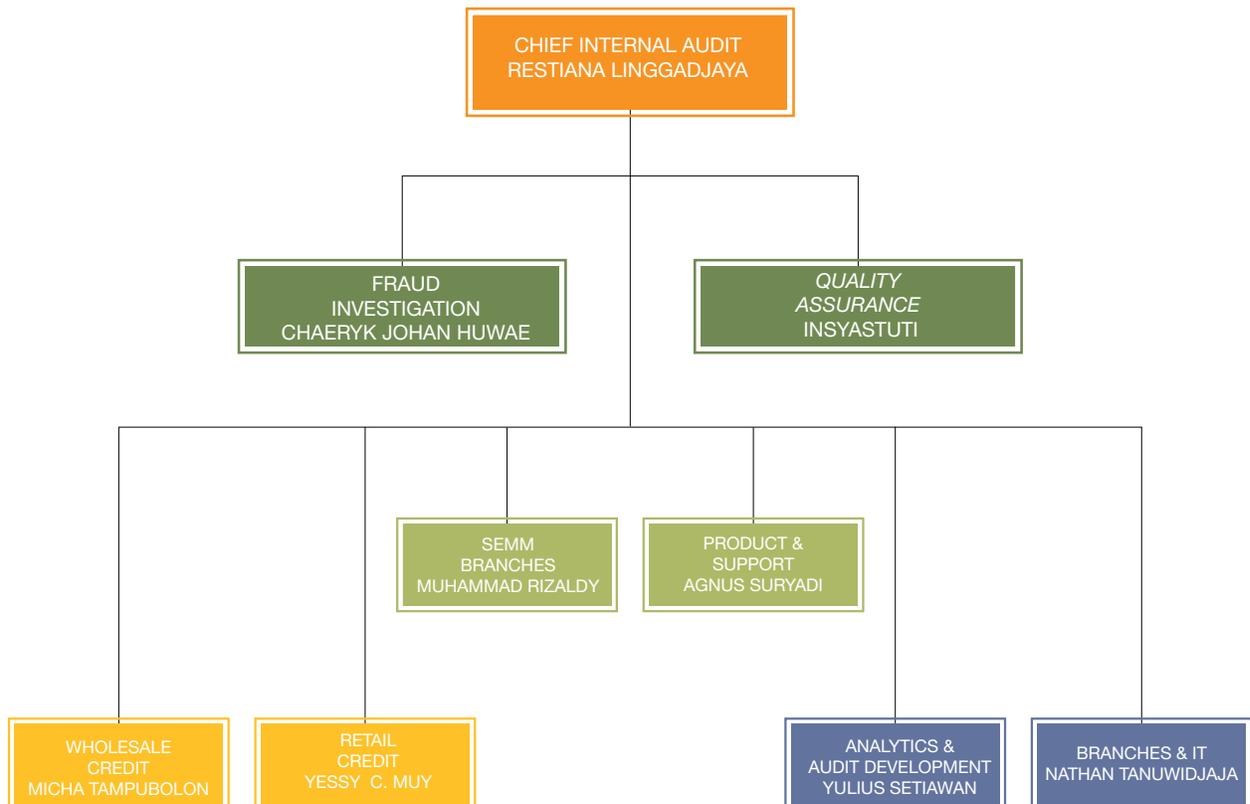
#### 9.3. Rencana Kegiatan Tahun 2010

1. SKAI telah menetapkan perencanaan audit terhadap 672 obyek pemeriksaan yang mencakup:
  - a. 50 obyek pemeriksaan di Kantor Pusat, yang meliputi aspek perkreditan, bisnis, produk, operasional, support dan information technology

Laporan Komite Pemantau Risiko	Laporan Komite Nominasi & Remunerasi	Laporan Komite Corporate Governance	Direksi & Komite dibawah Direksi	Kepatuhan
Evaluasi & Manajemen Risiko	Pihak Terkait & Kredit	Rencana Strategis	Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan	Opsi Saham bagi Direksi & Karyawan Senior

- b. 23 obyek pemeriksaan di Kantor Wilayah, yang meliputi Kantor Pelayanan Wilayah, Cabang Small Medium Enterprise (SME) Branches, Retail Banking dan Consumer Mass Market (CMM) Credit Factory.
  - c. 416 Danamon Simpan Pinjam, termasuk 100 Cluster SEMM dan 316 Unit SEMM
  - d. 183 cabang, termasuk Cabang Konvensional, Cabang Syariah, Cabang Adira, cabang Small Medium Enterprise & Commercial (SMEC) dan cabang Credit Support Administration (CSA)
2. Menetapkan arah perencanaan audit tahun 2010 yang lebih sejalan dengan risiko-risiko kunci dan memfokuskan penggunaan waktu audit pada bidang yang memiliki risiko lebih tinggi.
  3. Memfokuskan kepada implementasi New Core Banking System (NCBS), aktivitas Treasury, produk-produk Unsecured, nasabah dengan risiko tinggi (High Risk Customers), pelayanan dari pihak ketiga, dan kepatuhan terhadap model bisnis.
  4. Analisis diperluas kepada obyek pemeriksaan yang memiliki risiko tinggi dengan jaringan cabang yang lebih banyak sebagai tambahan dari analisis SEMM tahun 2009.  
Ruang lingkup pemeriksaan SKAI meliputi seluruh lini usaha, kelompok produk dan fungsi pendukung di Kantor Pusat dan Kantor Cabang, termasuk anak perusahaan Adira Finance, Adira Quantum dan Adira Insurance.

**STRUKTUR ORGANISASI SKAI**



## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

### 10. AUDIT EKSTERNAL

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan tahun 2009 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KPMG Siddharta & Wijaya dengan total

RISIKO	2009 AUDIT METHODOLOGY		
<b>Tinggi</b>		<b>12 Bulan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh entitas berisiko tinggi (Kantor Pusat &amp; Cabang)</li> <li>Peringkat Unsatisfactory</li> <li>Penyimpangan</li> </ul>	
<b>Medium</b>		<b>24 Bulan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entitas Kantor Pusat (Risiko Menengah dan Rendah)</li> <li>SEMM Cluster (Risiko Menengah &amp; Rendah)</li> <li>Cabang: Risiko Menengah dengan Peringkat <i>Need Improvement &amp; Acceptable</i></li> </ul>	
<b>Rendah</b>	<b>36 Bulan</b> Khusus Cabang Konvensional Risiko Rendah (Peringkat <i>Need Improvement &amp; Acceptable</i> )		
	<b>ACCEPTABLE</b>	<b>NEED IMPROVEMENT</b>	<b>UNSATISFACTORY</b>
	<b>ANALISIS DAN PERINGATAN AWAL - AUDIT BERBASIS RISIKO DINAMIS</b>		

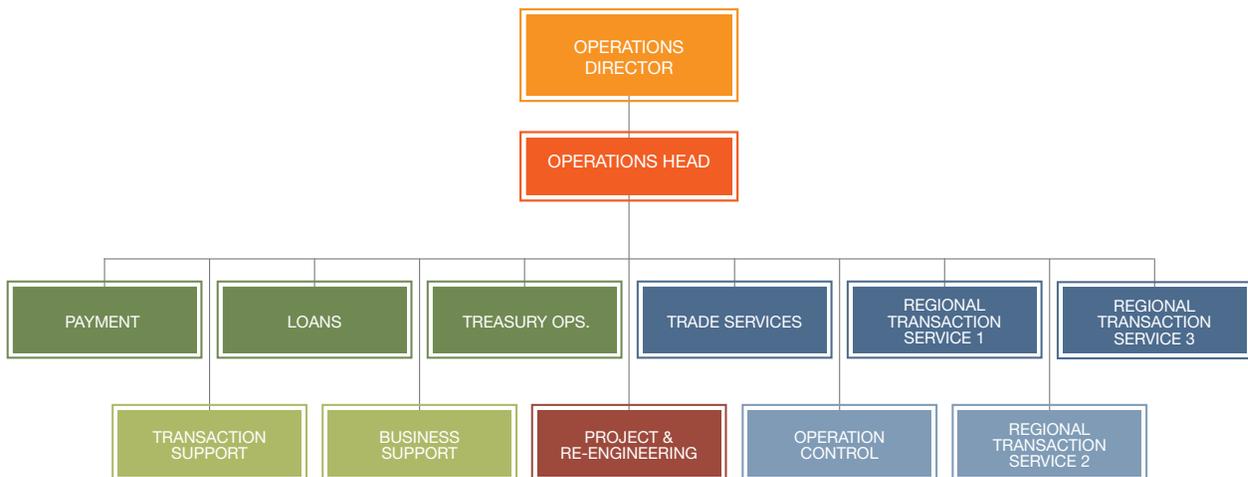
biaya sebesar USD 414,700. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik ini telah memperoleh persetujuan RUPS pada tanggal 25 Mei 2009. Management Letter yang diterima dari Auditor Independen telah menjadi perhatian Direksi Perseroan untuk ditindaklanjuti. Penunjukan Auditor Independen telah dilakukan

berdasarkan peraturan Bank Indonesia yang mensyaratkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia. Kantor Akuntan Publik KPMG Siddharta & Wijaya tidak memberikan jasa konsultasi manajemen bagi Perseroan selama tahun laporan.

## 11. INTERNAL CONTROL DALAM OPERASIONAL

Perseroan telah mengimplementasikan fungsi kontrol dalam operasinya, termasuk melalui pemisahan tugas, dual control/custody, rekonsiliasi dan proof call serta Standar Proses Kerja dan Pedoman Pelaksanaan. Kelompok Operational Control melaksanakan peninjauan langsung secara periodik ke cabang-cabang dan Divisi di Kantor Pusat guna melakukan random review untuk memastikan bahwa semua transaksi telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank.

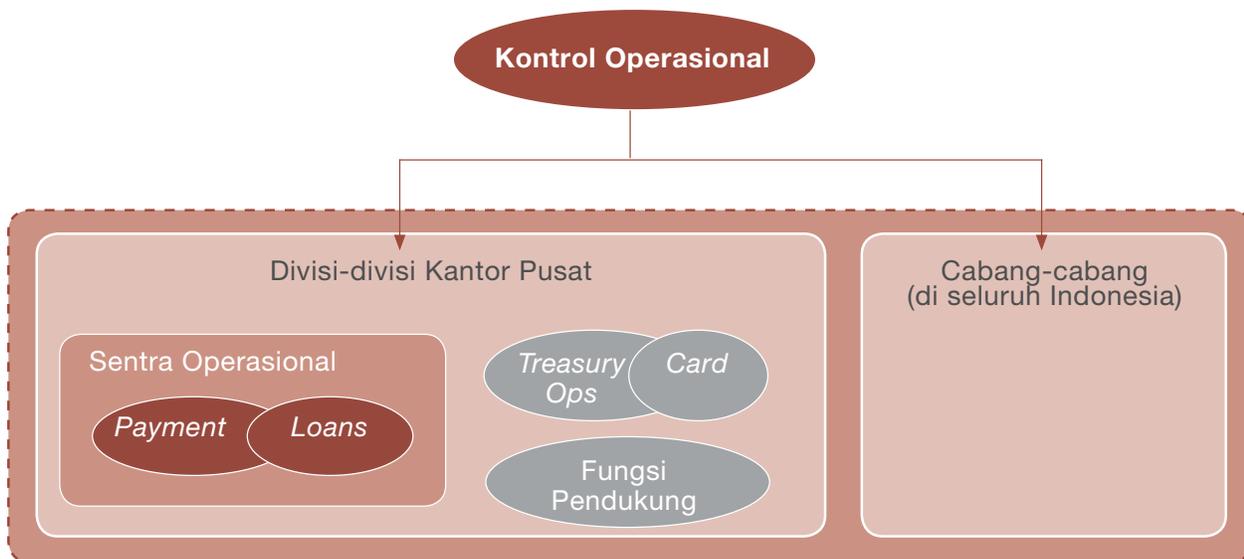
### STRUKTUR ORGANISASI OPERASIONAL



## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Secara periodik, kelompok tersebut memeriksa transaksi-transaksi khusus melalui on-line system query dan menyebarluaskan transaksi tersebut ke pihak-pihak operasional yang relevan untuk proses monitor dan tindakan korektif.

### RUANG LINGKUP KONTROL OPERASIONAL



Surveillance System dibawah manajemen Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) digunakan sebagai piranti kontrol internal untuk mendeteksi transaksi yang menyimpang. Quarterly Risk Control Self Assessment (RCSA) dilaksanakan oleh Unit Operasional. Aktivitas tersebut merupakan alat bantu pengawasan risiko guna mengukur tingkat eksposur risiko operasional serta kepatuhan dari masing-masing unit. Selain itu, juga dilakukan pelatihan Kontrol Internal Bank secara berkesinambungan sebagai bagian dari program pelatihan Perseroan untuk terus meningkatkan kompetensi

serta kesadaran pengawasan di seluruh jajaran organisasi.

Pemeringkatan Audit dari Unit Operasional adalah salah satu indikator kinerja bagi Unit Operasional dan kelompok Operation Control. Selama beberapa tahun, telah terjadi peningkatan signifikan atas peringkat audit yang diperoleh dari fungsi Audit Internal (SKAI). Berdasarkan Pemeringkatan Audit 2009, 75% meraih peringkat 'Memuaskan', 24% menerima peringkat 'Perlu Perbaikan', sedangkan 1% menerima peringkat 'Kurang Memuaskan'. Perseroan juga meluncurkan kampanye Anti-

Fraud Bank serta membentuk inisiatif kontrol di seluruh bagian organisasi guna meningkatkan fraud awareness di seluruh organisasi.

## 12. EVALUASI RISIKO DAN PENGELOLAAN RISIKO

### 12.1. Evaluasi Risiko dan Pengelolaannya

Risiko-risiko utama yang dihadapi Perseroan dan anak perusahaan telah diidentifikasi, dianalisis dan dikelola melalui suatu sistem

pengelolaan risiko yang terintegrasi dan menyeluruh. Direksi juga telah mengkomunikasikan misi, strategi, target pasar dan risk appetite serta indikator kinerja dan kriteria pengukuran kinerja melalui minimalisasi atas kejadian yang tidak diharapkan. Selain itu, telah dikembangkan mekanisme dan infrastruktur untuk mengevaluasi hambatan yang terjadi. Guna mengantisipasi terjadinya gangguan layanan, Perseroan juga telah membangun fasilitas back up serta rencana pemulihan usaha.

Dewan Komisaris dan Direksi menyadari pentingnya pengelolaan risiko bagi kegiatan usaha Perseroan. Unit-unit bisnis bertanggung jawab mengukur risiko-risiko yang sering dihadapi. Hasil evaluasi risiko didiskusikan dalam rapat Komite Risiko guna memastikan dilaksanakannya tindak lanjut yang memadai.

Pada kuartal 4 (empat) 2009, kinerja Perseroan berdasarkan internal self assesment meraih rating 2, yang mengindikasikan bahwa secara keseluruhan Perseroan memiliki peringkat yang sehat dan dapat menghadapi kondisi ekonomi dan keuangan negatif.

Berikut ringkasan hasil *self assesment* penilaian tingkat kesehatan Perseroan

Laporan Evaluasi tingkat Kesehatan Perseroan Per Desember 2009		
Komponen	Rating Komposit	Rating
Modal	1	Sehat
Kualitas Aset	2	Sehat
Manajemen	2	Sehat
Rentabilitas	2	Sehat
Likuiditas	2	Sehat
Sensitivitas Terhadap Risiko Pasar	2	Sehat
Rating Kesehatan Perseroan	2	Sehat

Secara aktif, Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan risiko seperti dinyatakan dalam kinerja komite-komite yang berkaitan dengan pengelolaan risiko. Di level eksekutif, Komite Risiko diketuai oleh Direktur Risiko, yang mengevaluasi profil risiko Perseroan dan menetapkan tindakan untuk mengurangi dan mengendalikan risiko. Komite tersebut berfungsi sebagai forum dimana Perseroan melaksanakan pengelolaan risiko di semua lini usaha dan anak perusahaan.

Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko bertugas melakukan evaluasi mendalam atas risiko-risiko Perseroan. Secara berkala, Komite mengadakan pertemuan dengan Komite Risiko dan Unit Pengelolaan

Risiko sebagai mitra kerja dalam mendiskusikan profil risiko Perseroan serta kecukupan kebijakan dan prosedur yang ada serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengendalian internal lainnya. Unit Pengelolaan Risiko memiliki staf yang kompeten dan berpengalaman dalam melakukan analisis risiko, penyusunan model dan metodologi, melaporkan analisis portofolio serta menyusun dan menyempurnakan kebijakan dan proses pengendalian risiko.

Rincian lebih lanjut atas pengelolaan risiko Perseroan diuraikan dalam bagian Pengelolaan Risiko dari Laporan Tahunan Perseroan tahun 2009.

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

### 12. 2. Hasil Peningkatan Perseroan

Perseroan diperingkat oleh lembaga pemeringkatan lokal dan internasional per 31 Desember 2009, peringkat Perseroan adalah sebagai berikut:

Credit Ratings		
Agency	Rating/Outlook	
PEFINDO (Indonesia) March 2009	Corporate Rating	idAA+ / Stable
	Bond Rating	idAA+ / Stable
Standard & Poor's October 2009	Long Term/Short Term Local Currency	BB- / B / Positive
	Long Term/Short Term Foreign Currency	BB- / B / Positive
		D/Stable
Fitch Ratings October 2009	Long-term/Short-term Foreign Currency	BB+/B/Stable
	National Long-term	AA+ (idn)/Stable
	Individual / Support Rating	C/D /3/Stable
Moody's September 2009	Global Local Currency Deposit	Baa3 / P-3 /Stable
	Foreign Currency Long Term / Short Term Deposit	BA3 / NP / Stable
	Bank Financial Strength Rating (BFSR)	D / Stable

### 13. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Bank Indonesia mengatur Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) serta prosedur pemberian pinjaman kepada pihak yang terkait. Selama tahun 2009, Perseroan tidak pernah melanggar dan/atau melampaui persyaratan BMPK. Perseroan juga membatasi konsentrasi pinjaman kepada individu, kelompok atau industri dalam upaya mengurangi risiko konsentrasi.

Kredit Kepada Pihak Terkait dan Kredit Berskala Besar per 31 Desember 2009			
No.	Fund Provision	Debitur	Nominal (Rp. Juta)
1.	Pihak terkait	Anak Perusahaan dan Manajemen Inti	995.496
2.	Grup/Debitur terbesar	25	5.872.054

Kredit kepada pihak terkait dan debitur terbesar per 31 Desember 2009:

#### 14. RENCANA STRATEGIS

Direksi telah menyampaikan rencana perusahaan kepada pemegang saham pengendali dan seluruh organisasi sehingga dapat diimplementasikan secara efektif. Rencana perusahaan disusun sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai rencana korporasi; yang memperhitungkan semua risiko yang relevan dan praktik perbankan yang berhati-hati. Rencana tersebut juga telah dikaji oleh Dewan Komisaris.

##### 14.1. Rencana Jangka Panjang

Untuk mewujudkan visinya, Perseroan berencana untuk tumbuh melalui berbagai alternatif, baik secara organik maupun non organik. Perseroan akan melakukan berbagai aktivitas dalam rangka pencapaian visi tersebut, antara lain dengan melanjutkan proses sinergi, dan aksi korporasi lainnya. Realisasi aksi korporasi tersebut akan disesuaikan dengan kondisi pasar dan makro ekonomi.

##### 14.2. Rencana Jangka Pendek

Dalam Jangka Pendek, prioritas strategis kami adalah sebagai berikut:

- Memprakarsai kembali Pertumbuhan Pinjaman di seluruh lini usaha

- Fokus pada Value Chain
- Penjualan silang antar nasabah dan lini usaha (LOB)
- Meningkatkan sinergi fungsi risiko untuk mendukung pertumbuhan bisnis
- Memusatkan pada Pengelolaan Sumber Daya Manusia
- Meluncurkan bisnis baru yaitu Pegadaian
- Pertumbuhan in-organic

##### 14.3. Rencana Jangka Menengah (2010-2012)

Dalam 3-5 tahun ke depan, target kami adalah sebagai berikut:

- Kredit**  
Menjaga kontribusi portofolio mikro pada level di atas 50% dari total kredit. Kami juga akan meningkatkan pangsa pasar unit usaha UKM kami menjadi 10% - 12%, Komersial menjadi 10%, Adira Finance menjadi 15% - 20% dan DSP menjadi 12% - 15%.
- Pendanaan**  
Mengembangkan jaringan Retail Banking kami menjadi sekitar 700 cabang untuk memperbaiki komposisi dana pihak ketiga kami. Kami merencanakan kontribusi deposito berjangka menjadi kurang dari 60% terhadap total pendanaan kami, sementara bagian giro dan tabungan akan ditingkatkan menjadi lebih dari 30% terhadap total pendanaan. Kami juga akan

mulai mengoptimalkan potensi pendanaan dari sektor mikro.

- Permodalan**

Kami akan secara berkesinambungan menjaga tingkat kecukupan permodalan kami, setelah mempertimbangkan risiko operasional yang akan mulai berlaku di tahun 2010, di atas tingkat yang ditentukan oleh pihak regulator.

#### 15. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Perseroan senantiasa mengkomunikasikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada para pemangku kepentingan secara kuartalan melalui media masa, paparan publik. Laporan keuangan dan laporan lainnya disampaikan ke Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK) serta pemangku kepentingan lain sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, laporan-laporan tersebut juga dapat diakses melalui situs resmi Perseroan ([www.danamon.co.id](http://www.danamon.co.id)).

Laporan yang disampaikan antara lain meliputi, Kondisi Keuangan Perseroan, informasi produk dan penggunaan data nasabah serta proses klaim nasabah. Laporan Tahunan disampaikan setidaknya kepada Bank Indonesia, Agensi Peringkat yang beroperasi di Indonesia, Asosiasi Perbankan Indonesia, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI),

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Bapepam – LK, Kementerian Perdagangan dan Industri, dan dua Lembaga Penelitian Ekonomi dan Keuangan. Penyampaian tersebut adalah sejalan dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

### 16. OPSI SAHAM BAGI DIREKSI DAN KARYAWAN SENIOR

#### 16.1. Kebijakan E/MSOP

Sejalan dengan misi menjadi perusahaan pilihan karyawan, Perseroan telah meluncurkan Employee/Management Share Option Plan (E/MSOP) pada tahun 2004. Tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan karyawan kunci dan memberikan penghargaan kepada anggota Direksi dan karyawan senior yang telah berprestasi dan memberikan sumbangsinya kepada pertumbuhan dan profitabilitas Perseroan. Kebijakan tersebut antara lain mengatur sebagai berikut:

- Anggota Direksi dan Karyawan Senior berhak menerima E/MSOP apabila kinerjanya melebihi kriteria yang ditetapkan oleh komite-komite terkait. Untuk menghindari benturan kepentingan, anggota Komisaris tidak dapat berpartisipasi dalam E/MSOP,

karena mereka bertanggungjawab untuk menentukan jumlah kompensasi bagi manajemen;

- Program opsi bagi mereka yang berhak untuk memiliki saham Perseroan adalah maksimum 5% dari jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh per tanggal 26 Maret 2004, atau jumlah keseluruhannya sebesar 245.346.100 saham Seri B dengan nilai nominal Rp500 per saham. Di tahun 2004, 2005 dan 2006 akumulasi jumlah opsi yang telah diberikan adalah sebesar 164.125.000 opsi, 225.196.800 opsi dan 254.638.300 opsi.
- Biaya kompensasi yang terkait dengan E/MSOP adalah sebesar Rp37 miliar di tahun 2004, Rp109 miliar di tahun 2005 dan Rp107

miliar di tahun 2006;

- Komisaris) menentukan alokasi dan pembagian opsi kepada anggota Direksi yang berhak dan Komite II (terdiri dari anggota Direksi) melakukan tugas yang sama untuk para karyawan senior;
- Periode vesting ditetapkan sedemikian rupa sehingga vested opsi dilakukan secara bertahap. Opsi akan tetap berlaku hingga periode maksimum 5 (lima) tahun sejak tanggal pemberian. Harga opsi ditetapkan untuk setiap pembagian opsi guna memastikan keadilan dan keselarasan bagi kepentingan karyawan dengan semua pemangku kepentingan (stakeholder).

Laporan Komite Pemantau Risiko	Laporan Komite Nominasi & Remunerasi	Laporan Komite Corporate Governance	Direksi & Komite dibawah Direksi	Kepatuhan
Evaluasi & Manajemen Risiko	Pihak Terkait & Kredit	Rencana Strategis	Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan	Opsi Saham bagi Direksi & Karyawan Senior

## 16.2. Opsi Saham Direksi

Sampai akhir Desember 2009, tercatat anggota Direksi Perseroan mendapat opsi saham seperti terlihat pada tabel di bawah:

### Anggota Direksi yang telah menerima Opsi Saham per 31 Desember 2009

Nama	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)	Periode Vesting <sup>4)</sup>
	Yang diberikan	Yang telah dieksekusi		
<b>Direksi</b>				
SEBASTIAN PAREDES	7,000,000	-	5,173 <sup>2)</sup>	3 years
	840,000	-	4,353 <sup>3)</sup>	3 years
MULIADI RAHARDJA	3,714,000	3,714,000	2,451 <sup>1)</sup>	3 years
	1,110,000	-	5,173 <sup>2)</sup>	3 years
SANJIV MALHOTRA	500,000	-	4,353 <sup>3)</sup>	3 years
	500,000	500,000	4,353 <sup>3)</sup>	3 years
ALI YONG	4,214,000	4,214,000	2,451 <sup>1)</sup>	3 years
	1,110,000	-	5,173 <sup>2)</sup>	3 years
	600,000	-	4,353 <sup>3)</sup>	3 years
VERA EVE LIM	3,714,000	3,714,000	2,451 <sup>1)</sup>	3 years
	1,110,000	-	5,173 <sup>2)</sup>	3 years
	600,000	-	4,353 <sup>3)</sup>	3 years
HERRY HYKMANTO	2,745,000	2,745,000	2,451 <sup>1)</sup>	3 years
	400,000	160,000	5,173 <sup>2)</sup>	3 years
	187,000	-	4,353 <sup>3)</sup>	3 years
KANCHAN KESHAV NIJASURE	3,714,000	3,714,000	2,451 <sup>1)</sup>	3 years
	1,110,000	777,000	5,173 <sup>2)</sup>	3 years
	600,000	240,000	4,353 <sup>3)</sup>	3 years
JOSEPH LUHUKAY	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
FRANSISKA OEI	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
Total	18,101,000	18,101,000	2,451 <sup>1)</sup>	3 years
	11,840,000	937,000	5,173 <sup>2)</sup>	3 years
	3,827,000	740,000	4,353 <sup>3)</sup>	3 years

**Note:**

- 1) Sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Maret 2009, harga pelaksanaan untuk opsi tanggal pemberian 1 Juli 2004 telah disesuaikan menjadi Rp. 1.792,- dan opsi tanggal pemberian 8 November 2004 menjadi Rp. 1.709,-
- 2) Sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Maret 2009, harga pelaksanaan untuk opsi tanggal pemberian 1 Juli 2005 telah disesuaikan menjadi Rp. 3.749,-
- 3) Sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Maret 2009, harga pelaksanaan untuk opsi tanggal pemberian 1 Juli 2006 telah disesuaikan menjadi Rp. 2.953,-
- 4) Opsi saham jatuh tempo dalam 3 tahun dan dapat dilaksanakan dalam 5 tahun sejak diberikan.

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

### 16.3. Kepemilikan Saham Perseroan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Per 31 Desember 2009, jumlah total kepemilikan saham Perseroan baik oleh anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi berjumlah kurang dari 0.07% dari seluruh jumlah saham Perseroan.

Kepemilikan Saham Perseroan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi		
Nama	Jumlah Saham	% Kepemilikan (per 31/12/ 2009)
Ng Khee Choe	82.843	0,0010%
Sebastian Paredes	1.155.500	0,0138%
Muliadi Rahardja	4.248.196	0,0506%
Herry Hykmanto	1.290.000	0.0154%
Vera Eve Lim	2.914.000	0,0347%
Ali Yong	2.514.500	0,0300%
Kanchan Keshav Nijasure	1.574.848	0,0188%

### 17. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS & DIREKSI YANG MENCAPAI 5% ATAU LEBIH DARI MODAL DISETOR

Per 31 Desember 2009, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki 5% atau lebih dari modal disetor Perseroan; ataupun di bank lain; di lembaga keuangan bukan bank, maupun perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

### 18. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Selain Komisaris Perseroan tertentu yang memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali, semua Komisaris Independen dan anggota Direksi Perseroan tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris dan Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan.

Penyimpangan Internal	Permasalahan Hukum	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	Buyback Saham
Hubungan Investor	Public Affairs	Laporan Dewan Pengawas Syariah	

## 19. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Perseroan atau pemberi kerja kepada pegawai yang

Rasio Perbandingan Gaji	
Keterangan	Rasio
Karyawan Tertinggi – Karyawan Terendah	80 x
Direktur Tertinggi – Direktur Terendah	3,2 x
Komisaris Tertinggi– Komisaris Terendah	1,5 x
Direktur Tertinggi – Karyawan Tertinggi	3,4 x

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Informasi di bawah menjelaskan rasio perbandingan gaji, yang meliputi kompensasi yang diterima per bulan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan tetap dalam Perseroan.

Tabel berikut menjelaskan rincian penyimpangan internal dalam Perseroan selama 2009.

Penyimpangan Internal	Jumlah kasus yang melibatkan					
	Manajemen		Karyawan Tetap		Karyawan Kontrak	
	2009	2008	2009	2008	2009	2008
Total internal fraud	0	0	23	18	2	1
Telah diselesaikan	0	0	23	18	2	1
Dalam proses internal	0	0	0	0	0	0
Proses Pending	0	0	0	0	0	0
Ditindak lanjuti melalui	0	0	8	7	0	0
Tindakan Hukum						

## 20. PENYIMPANGAN INTERNAL

Internal fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorar dan outsourcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Perseroan yang mempengaruhi kondisi Perseroan secara signifikan. Yang dimaksud dengan mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan secara signifikan adalah apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

### 21. PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Perseroan selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum. Di bawah ini adalah rekapitulasi Laporan Perkara Pidana dan Perdata per 31 Desember 2009.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah diselesaikan (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	45	17
Dalam proses penyelesaian	165	8
<b>Total</b>	<b>210</b>	<b>25</b>

### 22. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2009, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

### 23. BUY BACK SAHAM DAN/ATAU BUY BACK OBLIGASI OLEH PERSEROAN

*Buy back* saham dan/atau *buy back* obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Perseroan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, adapun tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2009, Perseroan tidak melakukan transaksi *buy back* saham dan/atau obligasi.

Penyimpangan Internal	Permasalahan Hukum	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	Buyback Saham
Hubungan Investor	Public Affairs	Laporan Dewan Pengawas Syariah	

Pengeluaran Yayasan Danamon Peduli tahun 2009		
No	Rincian	Jumlah (Rp)
1	Program Revitalisasi Pasar Tradisional (Pasarku Bersih, Sehat dan Sejahtera), termasuk lomba pasar serta survei pasar tradisional	4.687.260.920
2	Program Danamon Go Green (Mengubah limbah-limbah pasar menjadi kompos bermutu tinggi)	2.130.003.496
3	Respon Cepat-Tanggap Terhadap Bencana Alam	348.260.705
4	Program Pengembangan, Penggalangan Pengetahuan serta Pemantauan dan Evaluasi	169.896.036
5	Komunikasi Eksternal dan Laporan Akuntabilitas	244.372.881
6	Beban Operasional	2.407.101.966
TOTAL		9.986.896.004

#### 24. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN SPONSOR PARTAI POLITIK

Kebijakan Perseroan melarang keterlibatan Perseroan dalam kegiatan politik, termasuk memberikan donasi untuk kepentingan politik. Dengan demikian, Perseroan tidak melakukan aktifitas sumbangan untuk kegiatan politik. Namun demikian, untuk kegiatan sosial Perseroan memberikan sumbangan melalui Yayasan Danamon Peduli. Pada tahun 2009, Perseroan menyediakan dana sejumlah Rp. 10 miliar kepada Yayasan Danamon Peduli yang mengalokasikan dana tersebut sebagai berikut:

Rincian dana dan kegiatan sosial yang dilakukan Perseroan diuraikan secara lebih mendalam di bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari Laporan Tahunan Perseroan tahun 2009.

#### 25. SELF ASSESSMENT CORPORATE GOVERNANCE

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, pada tahun 2009 Perseroan melakukan Self Assessment pelaksanaan corporate governance. Self Assessment dilakukan terhadap 11 aspek yaitu:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Dewan Komisaris .
- Penanganan benturan kepentingan.
- Penerapan fungsi kepatuhan Bank.
- Penerapan fungsi audit intern.
- Penerapan fungsi audit ekstern.
- Fungsi manajemen risiko termasuk pengendalian intern.
- Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar.

- Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan intern.
- Rencana strategis Perseroan.

Peringkat atas aspek-aspek tersebut didasarkan pada kinerja pelaksanaan corporate governance terhadap kriteria minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan self assessment 2009, peringkat corporate governance Perseroan adalah sehat.

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

### 25.1. Kesimpulan Umum

Berdasarkan hasil Self Assessment tersebut, dapat dilaporkan bahwa Perseroan telah meraih peringkat Baik

Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit					
Self Assessment Corporate Governance					
No	Aspek Yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai	Catatan *)
		(a)	(b)	(a) x (b)	
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan komisaris	10,00%	2	0,200	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.</li> </ul>
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20,00%	2	0,400	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien.</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Aspek transparansi anggota Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/ perundangan yang berlaku</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.</li> </ul>
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	10,00%	2	0,200	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien.</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/ perundangan yang berlaku</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.</li> </ul>

Penyimpangan Internal	Permasalahan Hukum	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	Buyback Saham
Hubungan Investor	Public Affairs	Laporan Dewan Pengawas Syariah	

Self Assessment Corporate Governance					
No	Aspek Yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai	Catatan *)
		(a)	(b)	(a) x (b)	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Rekomendasi Komite-Komite, bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.</li> <li>Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara efektif dan efisien.</li> </ul>
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	10,00%	1	0,100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang sangat lengkap dan efektif.</li> <li>Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik.</li> <li>Selama tahun 2009 tidak terdapat benturan kepentingan.</li> </ul>
5.	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	5,00%	2	0,10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepatuhan Bank tergolong baik walaupun masih terdapat penyimpangan yang sifatnya tidak material terhadap ketentuan dan mayoritas komitmen yang telah dibuat telah diselesaikan pada masa triwulan penilaian CAMELS Rating.</li> <li>Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif.</li> <li>Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas satuan kerja operasional</li> <li>Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia lengkap dan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku</li> </ul>
6	Penerapan fungsi Audit Intern	5,00%	2	0,10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin.</li> <li>SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif</li> </ul>
7	Penerapan fungsi Audit Ekstern	5,00%	1	0,05	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.</li> <li>Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik.</li> <li>Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan</li> </ul>

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Self Assessment Corporate Governance					
No	Aspek Yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai	Catatan *)
		(a)	(b)	(a) x (b)	
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal	7,50%	2	0,15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manajemen efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.</li> <li>Manajemen aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.</li> <li>Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.</li> <li>Manajemen efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.</li> <li>Penerapan pengendalian intern telah diimplementasikan dengan baik apabila terdapat kelemahan telah dilakukan tindakan korektif sehingga tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi bank</li> </ul>
9	Kredit kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Kredit berskala besar	7,50%	2	0,15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.</li> <li>Tidak ada pelanggaran BMPK maupun pelampauan BMPK.</li> <li>Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.</li> <li>Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara Independent</li> </ul>
10	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	15,00%	1	0,15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bank sangat transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui <i>homepage</i> Bank dan media yang sangat mudah diakses.</li> <li>Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia sangat tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.</li> <li>Bank sangat transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan sangat efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah dengan sangat memadai.</li> </ul>

Penyimpangan Internal	Permasalahan Hukum	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	Buyback Saham
Hubungan Investor	Public Affairs	Laporan Dewan Pengawas Syariah	

Self Assessment Corporate Governance					
No	Aspek Yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai	Catatan *)
		(a)	(b)	(a) x (b)	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Cakupan laporan pelaksanaan GCG sangat lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara sangat tepat waktu kepada <i>shareholder</i> sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan sangat tepat waktu, akurat, lengkap dan sangat handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen</li> </ul>
11	Rencana Strategis Bank	5,00%	2	0,1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank.</li> <li>Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.</li> <li>Realisasi rencana bisnis sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>).</li> <li><i>Low Strategic Risk Rating</i> atau <i>Moderate to Low Strategic Risk Rating</i></li> </ul>
Komposit		100,00%		1,700	

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1,5	Sangat baik
1,5 ≤ Nilai Komposit < 2,5	Baik
2,5 ≤ Nilai Komposit < 3,5	Cukup baik
3,5 ≤ Nilai Komposit < 4,5	Kurang baik
4,5 ≤ Nilai Komposit < 5	Tidak baik

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

### 25.2. Kalender Kegiatan Tindakan Korporasi Selama Tahun 2009

Tanggal	Tindakan Korporasi
20 Maret 2009	<i>Right issue</i> (berdasarkan tanggal efektif Bapepam)
30 Maret 2009	Pembayaran <i>subdebt</i>
5 Juli 2009	Pembayaran <i>dividen</i>
9 Juli 2009	<i>Adira call option</i> (akuisisi Adira Asuransi, penambahan modal di Adira Finance)
23 Juli 2009	Penambahan modal setor Adira Quantum

### 26. SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab terhadap komunikasi tentang informasi material Perseroan secara tepat waktu dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan. Pengumuman mengenai kondisi dan kinerja Perseroan telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan serta Anggaran Dasar Perseroan.

Berikut adalah daftar keterbukaan Perseroan selama tahun 2009:

Tanggal	Perihal	Rujukan/Ketentuan
29 Januari 2009	Rencana Pelaksanaan Public Expose	Peraturan BEI No. I.E. tentang Kewajiban Penyampaian informasi
6 Februari 2009	Penyampaian Materi Public Expose	Peraturan BEI No. I.E. tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
12 Februari 2009	Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham	Peraturan Bapepam No. IX.I.1. tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
13 Februari 2009	Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2009	Peraturan Bapepam X.K.2
13 Februari 2009	Pemberitahuan Rencana Bank Danamon melakukan Penawaran Umum Terbatas IV	Peraturan Bapepam No. IX.D.1
16 Februari 2009	Penyampaian Materi Public Expose	Peraturan BEI No. I.E. tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
19 Februari 2009	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Penawaran Umum Terbatas IV kepada Para Pemegang Saham dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Right Issue)	Peraturan Bapepam X.K.1
20 Februari 2009	Penyampaian Bukti Iklan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	Peraturan BEI No. I.E. tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
10 Maret 2009	Keterbukaan Informasi tentang Penyampaian Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Maret 2009	Peraturan BEI No. I.E. tentang Kewajiban Penyampaian Informasi

Penyimpangan Internal	Permasalahan Hukum	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	Buyback Saham
Hubungan Investor	Public Affairs	Laporan Dewan Pengawas Syariah	

Tanggal	Perihal	Rujukan/Ketentuan
19 Maret 2009	Perubahan Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2009	Peraturan Bapepam No. X.K.2
19 Maret 2009	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Penawaran Umum Terbatas IV kepada Para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Right Issue)	Peraturan BEI No. I.E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
24 Maret 2009	Hasil RUPS Luar Biasa 23 Maret 2009	Peraturan Bapepam No. IX.I.1
24 Maret 2009	Laporan Efektifnya Perubahan Anggaran Dasar Bank Danamon sehubungan dengan Penambahan Modal Disetor per Akhir Desember 2008	Peraturan BEI No. I.E. tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
16 April 2009	Rencana Pelaksanaan RUPS	Peraturan Bapepam No. IX.I.1. tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS
22 April 2009	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	Peraturan Bapepam No. X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham
23 April 2009	Penyampaian Bukti Iklan RUPS Tahunan dan Luar Biasa	Peraturan BEI No. I.E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
23 April 2009	Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan – Tahun Buku 2008	Peraturan Bapepam X.K.2
24 April 2009	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	Peraturan Bapepam No. X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham
24 April 2009	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit Q1 – 2009	Peraturan BEI No. I.E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
26 Mei 2009	Hasil RUPS Tahunan dan Luar Biasa 25 Mei 2009	Peraturan BEI No. I.E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
29 Mei 2009	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	Peraturan Bapepam No. X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham
27 Mei 2009	Keterbukaan Informasi tentang Penyampaian Iklan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	Peraturan BEI No. I.E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
29 Mei 2009	Keterbukaan Informasi tentang Pengumuman Pengambilalihan (Akuisisi) 13.500 saham yang Mewakili 90% dari semua saham yang telah dikeluarkan oleh PT Asuransi Adira Dinamika	Peraturan BEI No. I.E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
3 Juni 2009	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	Peraturan Bapepam No. X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
11 Juni 2009	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	Peraturan Bapepam No. X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
12 Juni 2009	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	Peraturan Bapepam No. X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
15 Juni 2009	Penyampaian Akta Perubahan Anggaran Dasar	Peraturan Bapepam No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada publik
15 Juni 2009	Penyampaian Akta Perubahan Anggaran Dasar	Peraturan BEI No. I.E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
15 Juni 2009	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	Peraturan Bapepam No. X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
19 Juni 2009	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	Peraturan Bapepam No. X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Tanggal	Perihal	Rujukan/Ketentuan
22 Juni 2009	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	Peraturan Bapepam No. X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
23 Juni 2009	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	Peraturan Bapepam No. X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
29 Juni 2009	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	Peraturan Bapepam No. X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
3 Juli 2009	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	Peraturan Bapepam No. X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
17 Juli 2009	Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan (Unaudited) per 30 Juni 2009 dan 2008	Peraturan Bapepam No. X.K.2
5 Agustus 2009	Penyampaian Akta Perubahan Modal karena E/MSOP dan Right Issue	Peraturan BEI No. I.E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
25 Agustus 2009	Penyampaian Akta Perubahan Pengurus	Peraturan BEI No. I.E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
5 Oktober 2009	Perubahan Anggaran Dasar Karena E/MSOP Posisi Q2 tahun 2009	Peraturan BEI No. I.E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
7 Oktober 2009	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	Peraturan Bapepam No. X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
7 Oktober 2009	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	Peraturan Bapepam No. X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
8 Oktober 2009	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	Peraturan Bapepam No. X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
13 Oktober 2009	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	Peraturan Bapepam No. X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
13 Oktober 2009	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	Peraturan Bapepam No. X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
13 Oktober 2009	Perubahan Anggaran Dasar Karena E/MSOP Posisi Q2 tahun 2009	Peraturan BEI No. I.E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
23 Oktober 2009	Perubahan Anggaran Dasar Karena E/MSOP Posisi Q3 tahun 2009	Peraturan Bapepam No. X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
27 Oktober 2009	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	Peraturan Bapepam No. X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
10 November 2009	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	Peraturan Bapepam No. X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
17 November 2009	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	Peraturan Bapepam No. X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu

Penyimpangan Internal	Permasalahan Hukum	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	Buyback Saham
Hubungan Investor	Public Affairs	Laporan Dewan Pengawas Syariah	

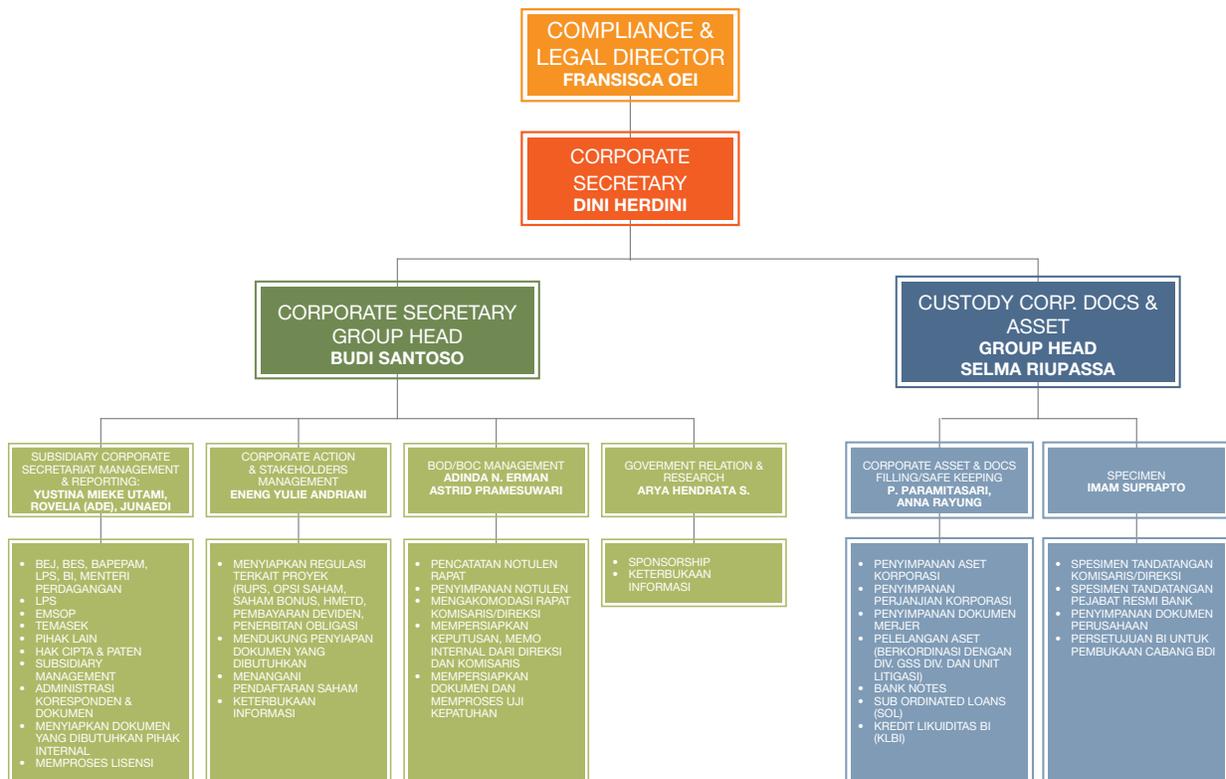


**Sekretaris Perusahaan** bertugas membantu Direksi terkait dengan akuntabilitas dan tanggung jawab Direksi atas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Corporate Governance yang baik serta kegiatan sosial, dengan demikian sejak tanggal 3 April 2008, Perseroan telah menunjuk Dini Herdini sebagai Sekretaris Perusahaan.

Riwayat hidup Sekretaris Perusahaan Perseroan adalah sebagai berikut: Dini Herdini, 44 tahun, meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti tahun 1987. Selama hampir 5 (lima) tahun, Dini berkarir di bidang layanan hukum (Lembaga Bantuan Hukum dan Firma Hukum) dan selama 14 tahun di sektor perbankan (Bank Patungan Asing dan Bank Swasta Nasional) hingga kini. Beberapa pengalaman kerjanya termasuk menjadi anggota Kelompok Implementasi dan Pembentukan PT

Bank Ekspor Indonesia; Koordinator Hukum untuk proses merger PT Bank PDFCI ke dalam PT Bank Danamon Indonesia, Tbk; serta Auditor Hukum di Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk audit kinerja PT TASPEN (Persero) dan PT Semen Gresik Tbk (Persero). Berbagai pengalaman di sektor perbankan dan pasar modal mencakup antara lain restrukturisasi kredit, pembiayaan proyek, serta merger & akuisisi. Terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

### STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS PERUSAHAAN



## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

(HKHPM), Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), serta peraih Sertifikasi BSMR level 2. Dini ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan pada tanggal 3 April 2008.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Perseroan antara lain sebagai berikut:

- Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya terkait dengan regulasi pasar modal dan menyampaikan Informasi mengenai perkembangan tersebut kepada Dewan Komisaris, Direksi dan pemangku kepentingan Perseroan.
- Menyediakan layanan kepada publik mengenai Informasi terkait dengan Perseroan.
- Memberikan saran-saran kepada Direksi mengenai tindak ketidakpatuhan terhadap peraturan Nomor 8 tahun 1995 mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.
- Sebagai perantara antara Perseroan dengan pihak otoritas (Bapepam – LK, Bursa dan lain-lain) dan publik.
- Pengawasan dan saran-saran terkait dengan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan.
- Mempersiapkan dan menghadiri rapat Dewan Komisaris dan Direksi serta memastikan bahwa hasil rapat telah didokumentasikan dengan benar di dalam risalah rapat.
- Memastikan seluruh laporan wajib Perseroan kepada institusi yang berwenang dan pihak lainnya telah dilakukan secara tepat.

### 27. HUBUNGAN INVESTOR

Hubungan Investor bertugas membangun komunikasi yang efektif antara Perseroan, komunitas finansial dan pihak-pihak terkait lainnya guna menjaga nilai dari surat berharga Perseroan.

Kegiatan Penyebarluasan Informasi		
Forum	Frekuensi/ Durasi	Catatan
Pertemuan Analis/Paparan Publik	4 kali	Pertemuan tiap kuartal antara manajemen <i>senior</i> dengan pihak analis/investor untuk mempresentasikan arah dan strategi dalam menghadapi situasi saat ini dan di masa yang akan datang oleh Perseroan.
Laporan Keuangan	4 kali	Informasi mengenai posisi keuangan yang <i>unaudited</i> serta perubahan atas posisi keuangan Perseroan.
Laporan Tahunan	1 kali	Laporan komprehensif atas kegiatan Perseroan selama satu tahun, termasuk kinerja keuangan yang diaudit oleh auditor eksternal independen.
<i>Non Deal Roadshows and conferences</i>	23 hari	Pertemuan dengan investor institusional asing untuk mempresentasikan kinerja Perseroan terakhir, termasuk kondisi makro ekonomi, perkembangan pasar, peraturan dan isu-isu terakhir.
Pertemuan tatap muka dan <i>conference call</i>	238 kali	Pertemuan dengan kelompok analis dan/atau investor untuk mendiskusikan kinerja keuangan dalam periode pelaporan. <i>Conference call</i> diselenggarakan untuk partisipasi asing guna membahas hal-hal khusus.

Hubungan Investor juga bertugas untuk mengkomunikasikan strategi finansial dan strategi keseluruhan Perseroan guna menjaga citra Perseroan yang kohesif.

Informasi-Informasi tersebut dikomunikasikan melalui berbagai media dan publikasi komunikasi, seperti paparan publik, conference call, pertemuan tatap muka dengan investor serta publikasi laporan keuangan per kuartal, laporan tahunan dan situs Perseroan.

**28. PUBLIC AFFAIRS**

Hubungan Perseroan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternalnya dikelola melalui divisi Public Affairs. Divisi ini juga memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan internal dan eksternal serta panduan untuk corporate branding. Divisi ini terbagi dalam empat subdivisi, yaitu: Internal Communication, Event Management, Brand Management dan External Affairs.

**28.1. Internal Communications (Komunikasi Internal)**

Internal Communications bertanggung jawab memastikan ketersediaan serta sirkulasi informasi bagi seluruh karyawan termasuk karyawan anak-anak perusahaan (subsidiaries) dan memelihara jaringan komunikasi internal yang terdiri dari:

- Intranet Portal**

Merupakan fasilitas intranet yang dapat diakses oleh seluruh Karyawan (belum termasuk karyawan di anak perusahaan) yang dihubungkan melalui fasilitas email. Portal Intranet memberikan berbagai Informasi untuk kepentingan karyawan serta juga memberikan akses Informasi untuk mendukung pekerjaan sehari-hari. Berbagai Informasi mulai dari data-data mengenai perusahaan hingga arsip kebijakan serta memo yang telah dipublikasikan dapat ditemukan disini. Fasilitas portal baru saja disempurnakan dengan Portal 2nd Generation yang telah aktif sejak Maret 2009. Portal 2nd Generation ini disiapkan untuk dapat menjadi fasilitas

yang mendukung aktivitas kerja secara baik, sekaligus menjadi media Informasi yang efektif. Sejak diluncurkannya, Portal 2nd Generation terus berkembang sesuai kebutuhan karyawan di antaranya, fitur survey engine yang memungkinkan unit-unit kerja untuk melakukan polling suatu topik tertentu, forum diskusi umum serta Live Chat dengan jajaran direksi.



## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

### • Majalah Spirit

Merupakan majalah internal yang disirkulasikan setiap bulan. Dicitak sebanyak 10,000 edisi setiap bulannya dan disirkulasikan kepada karyawan di Kantor Pusat; Kantor-kantor Wilayah serta cabang-cabang Perseroan, dan kantor-kantor Adira Finance, Adira Insurance dan Adira Kredit.

Tim Internal Communications bertindak sebagai Tim Editorial Majalah Spirit dan berkolaborasi dengan berbagai divisi dan unit kerja dalam pemuatan berbagai berita dan artikel Informatif dan edukatif seputar Perseroan maupun topik termutakhir di industri.



### • E-mail Blasts

Merupakan fasilitas sirkulasi informasi massal yang dapat diatur pengirimannya, baik kepada seluruh karyawan, maupun kelompok karyawan tertentu. Dalam prosesnya, email blast dapat berupa informasi manajemen yang diolah Divisi Public Affairs dan diteruskan pada kelompok karyawan sesuai kepentingannya, atau oleh users dari berbagai divisi dan setelah melalui proses evaluasi dari Divisi Public Affairs / tim Internal Communications, diteruskan pada Divisi IT untuk dikirimkan melalui email broadcast.

Selama tahun 2009 total sebanyak 295 judul email blast telah dikirimkan kepada karyawan.

Penyimpangan Internal	Permasalahan Hukum	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	Buyback Saham
Hubungan Investor	<b>Public Affairs</b>	Laporan Dewan Pengawas Syariah	



Komitmen Danamon sebagai organisasi yang senantiasa memberikan layanan berkualitas yang mengacu pada Quality Management System kembali diakui dunia internasional dengan lolosnya Danamon dalam Surveillance Audit terhadap unit-unit ISO pada April 2009 lalu, dan karenanya berhak melanjutkan sertifikasi ISO 9001:2008 - Quality Management System yang telah diraih sejak tahun 2003



Danamon Access Center • Opening & closing of current & saving account in MBD branch • Statement Management • Real Time Gross Settlement • International Remittance • Centralized E-Channel Reconciliation & Resolution • Centralized Signature Verification • Information Technology (Data Center, Data Center Admin & Process Quality, Service Monitoring, Helpdesk, System Security Operations, Disaster Recovery Center, Data Center Facilities Management, Availability Management, Production Continuity Management).



Satu lagi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan } Bisa

• **Internal Communications (IC) Forum**

Merupakan forum pertemuan antara Person In Charge/PIC yang ditunjuk mewakili tiap divisi/unit kerja berkenaan dengan penyebaran informasi yang perlu diketahui setiap unit dan/atau yang perlu dibagikan dengan unit-unit lainnya. IC Forum merupakan inisiatif tim Internal Communications yang dimulai sejak pertengahan tahun 2008, dan selama tahun 2009 telah berjalan sebanyak 5 (lima) kali, dengan detail sebagai berikut:

Forum	Tanggal	Jumlah Peserta	Topik
I	18/02/09	65 orang	<i>Soft Launching</i> Arahan dari Vice President Director
			Pengenalan fitur Portal 2nd Generation - Try Out
II	12/03/09	50 orang	<i>Launching Portal 2nd Generation</i> Arahan dari President Director
III	12-22/04/09	140 orang	<i>Training Class Portal 2nd Generation</i>
IV	16/08/09	40 orang	Arahan dari Vice President Director Program Updates – Internal Communications Sosialisasi proses penggunaan Internal Communications Channels
V	16/12/09	32 orang	<i>Writing Skill Workshop</i> Mengundang pembicara Devi Asmarani (Jurnalis, Penulis Skrip, Kolumnis) dan Enda Nasution yang dikenal sebagai Bapak Blogger Indonesia <i>Sharing Session</i> dari Agung Nugroho, Karyawan Danamon yang juga penulis buku "Ocehan Si Mbot"

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

### • Telekonferensi dengan RCO

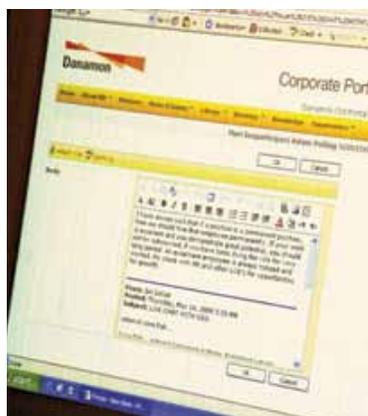
RCO – Regional Corporate Officers merupakan personil yang ditunjuk sebagai perwakilan perusahaan dalam berhubungan dengan:

- (i) pihak eksternal, yaitu Pemerintah, media, dll. dalam menanggapi pertanyaan seputar kinerja serta hal-hal terkini tentang organisasi;
- (ii) pihak internal, yakni seluruh karyawan di wilayah masing-masing, terlepas dari segmentasi yang ada, sebagai perpanjangan tangan manajemen kantor pusat dalam menyampaikan berbagai Informasi terkini Perseroan serta menanggapi isu-isu yang berkembang dan memastikan karyawan memperoleh informasi dari sumber resmi yang ditunjuk perusahaan.

Menyadari pentingnya fungsi ini, sejak November 2008 dilakukan komunikasi rutin mingguan dengan seluruh RCO melalui fasilitas teleconference yang dipandu langsung oleh Vice President Director. Tim Internal Communications memfasilitasi berjalannya proses ini, mendokumentasikan informasi penting terkait serta melakukan sejumlah follow-up actions bersama para RCO.

### • Chatting Bulanan dengan BOD

Merupakan kegiatan baru yang dilakukan dalam tahun 2009 yakni kegiatan dimana seluruh karyawan secara 1-on-1 dapat berkomunikasi langsung dengan Presiden Direktur atau dengan jajaran direksi lainnya untuk menanyakan hal-hal seputar Perseroan. Fungsi ini memang dibuat untuk memfasilitasi adanya sistem keterbukaan informasi antar manajemen dengan karyawan. Dalam melakukan kegiatan ini Presiden Direktur didampingi oleh Public Affairs Head beserta Internal Communications Head & Tim. Upaya yang berkesinambungan ini dilakukan untuk memberikan layanan terbaik bagi seluruh stakeholder, dan Perseroan akan selalu memperbaharui dan meningkatkan komunikasi.



Penyimpangan Internal	Permasalahan Hukum	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	Buyback Saham
Hubungan Investor	Public Affairs	Laporan Dewan Pengawas Syariah	

- **BOD Road Show**

Dalam menjalankan perannya Internal Communications melakukan program yang bertujuan untuk dapat memfasilitasi manajemen, dalam hal ini Direksi, agar dapat berkomunikasi langsung dengan semua perwakilan wilayah untuk menyampaikan kondisi perusahaan dan strategi kedepan sehingga seluruh karyawan di wilayah mendapatkan informasi yang benar dan jelas dan dapat menjalankan strategi yang sesuai dengan perusahaan. Sampai saat ini Perseroan membagi wilayah operasionalnya menjadi 7 wilayah di seluruh Indonesia.

Kesempatan ini digunakan oleh semua perwakilan wilayah untuk dapat bertanya langsung kepada Direksi dan menyampaikan pertanyaan atau aspirasi hasil dari mekanisme komunikasi Bottom-Up (dari bawah ke atas) dimana PUK juga berfungsi sebagai jembatan informasi antara karyawan dan manajemen, dengan begitu diharapkan Informasi tersebut akan tersampaikan secara berantai ke seluruh karyawan di wilayah dan juga ke manajemen. Dalam pelaksanaannya, Direksi melakukan perjalanan ke setiap wilayah 2 (dua) kali dalam setahun, dengan mengadakan pertemuan untuk semua pejabat senior yang berada di wilayah tersebut.

BOD Road Show I (Mei - Juni 2009)		
Tanggal	Wilayah/Kota	Keterangan
07 Mei 2009	Balikpapan	• <i>Highlights of Q1-2009 Results</i>
11 Mei 2009	Medan	• <i>Organizational Highlights - Strategic Priorities 2009</i>
29 Mei 2009	Semarang	• <i>Current Situation</i>
05 Juni 2009	Bandung	• <i>Key Actions</i>
12 Juni 2009	Surabaya	• <i>Media Coverage</i>
15 Juni 2009	Makassar	• <i>Work Flow (External &amp; Internal Communications)</i>
24 Juni 2009	Jakarta	• <i>Communication Channels (Top Down &amp; Bottom Up)</i> • <i>Role of RCO &amp; BCO (Governance Related)</i>
BOD Road Show II (Nov - Des 2009)		
Tanggal	Wilayah/Kota	Keterangan
05 Nov 2009	Jakarta	• <i>Remarks</i>
21 Nov 2009	Semarang	• <i>Clear Skies</i>
23 Nov 2009	Makassar	• <i>Key Challenges</i>
19 Nov 2009	Surabaya	• <i>Opportunities</i>
07 Des 2009	Balikpapan	• <i>2010 Strategic Priorities</i>
09 Des 2009	Bandung	
16 Des 2009	Medan	

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*



BOD Roadshow dilakukan di setiap region dengan mengundang semua *senior officer* di region tersebut, untuk dapat berkomunikasi secara terbuka dengan Direksi. Pada kesempatan ini dilakukan juga penyerahan penghargaan bagi karyawan yang telah bekerja selama 15 - 20 tahun.

### 28.2. External Affairs (Komunikasi Eksternal)

External Affairs bertugas untuk mengelola komunikasi dengan para pemangku kepentingan khususnya melalui media massa guna membangun citra Perseroan yang sesuai. Berikut daftar kegiatan yang diselenggarakan oleh External Affairs:

- **Membangun hubungan dengan media**

Kontak rutin dengan wakil-wakil media untuk mengukur persepsi publik atas Perseroan. Berbagai kegiatan telah diselenggarakan untuk membangun hubungan dengan mass media antara lain workshop, konferensi, briefing dan kunjungan ke media.

- **Pengelolaan Komunikasi**

Di tahun 2009, Perseroan telah menyelesaikan penyusunan Panduan Komunikasi untuk seluruh organisasi, guna memberikan pedoman komunikasi di periode normal

atau krisis. Sosialisasi kepada pejabat senior yang menjalankan peran komunikasi eksternal, telah dilaksanakan di tujuh pusat wilayah operasional Perseroan, yaitu di Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, Makassar, Surabaya dan Balikpapan. Peserta pelatihan ini antara lain para Regional Corporate Officer (RCO) dan Branch Corporate Officer (BCO) yang telah ditunjuk sebagai wakil dari Perseroan di masing-masing wilayahnya. Pada pertengahan tahun 2009, telah

dilaksanakan pelatihan tentang peta media massa di Indonesia, dengan penekanan pada media-media baru, atau new media dengan semakin maraknya jejaring sosial dan media online. Perseroan telah menjadikan media-media baru ini dalam menyampaikan informasi kepada para pemangku kepentingannya dalam kampanye menggalang dukungan via polling global untuk Danamon Peduli yang selanjutnya meraih juara kedua dalam BBC World Challenge 2009.

- **Audit Persepsi dan Benchmarking**

Media massa berperan besar dalam pembentukan opini masyarakat terhadap suatu institusi. Untuk mengukur persepsi media terhadap Danamon, telah dilakukan riset kuantitatif oleh pihak ketiga yang melibatkan 25 orang redaktur atau asisten redaktur yang berasal dari media-media cetak umum nasional, media cetak ekonomi dan keuangan, majalah serta media online utama di Indonesia untuk tahun 2009.

Survey yang juga meneliti media-media komunikasi yang umumnya



digunakan media untuk mengakses informasi tentang Danamon. Temuan-temuan dari survey ini akan digunakan untuk menyusun rencana komunikasi strategis Danamon di tahun 2010 dan selanjutnya.

Dalam hal jumlah serta frekuensi penyampaian informasi, 68% responden menjawab sering mendapatkan press release dari Danamon secara reguler.

Terkait isi informasi yang disampaikan dalam bentuk tertulis, 60% responden menjawab isi dari press release yang dikirimkan Danamon berkualitas baik.

Terkait cara mengakses informasi tentang Danamon, 72% responden mengakses informasi seputar Danamon melalui telepon; 60% responden mengakses informasi seputar Danamon melalui keterangan pers/press release; 48% responden mengakses informasi seputar Danamon melalui email; 44% responden mengakses informasi seputar Danamon melalui kontak kepada jajaran manajemen dan sisanya sebesar 4% responden menjadikan rumor/isu yang beredar sebagai sumber informasi. Survey juga menyimpulkan bahwa tidak ada responden yang mengakses informasi seputar Danamon melalui website.

• **Situs Internet**

Situs internet [www.danamon.co.id](http://www.danamon.co.id) tidak hanya merupakan portal layanan, melainkan juga berfungsi sebagai penyedia informasi terkini bagi pihak-pihak luar, baik publik

maupun para investor. Situs korporat Perseroan yang baru akan diluncurkan pada tahun 2010 dan akan mencerminkan karakter dan semangat brand Perseroan.

• **Media Komunikasi lainnya**

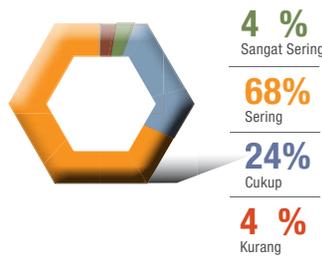
Sebagai perusahaan publik, Perseroan senantiasa menjunjung tinggi asas transparansi dan keadilan melalui komunikasi terus menerus dengan para pemangku kepentingan, dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi, baik media cetak maupun elektronik. Perseroan mencatat keluhan-keluhan yang disampaikan secara online dan langsung melakukan penanganan terhadapnya. Keluhan-keluhan terus terpantau dari lini depan hingga Kantor Pusat serta digunakan sebagai masukan guna memperbaiki kinerja Perseroan di masa mendatang.

Selama tahun 2009, telah diselenggarakan berbagai kegiatan komunikasi dan publikasi seperti berikut:

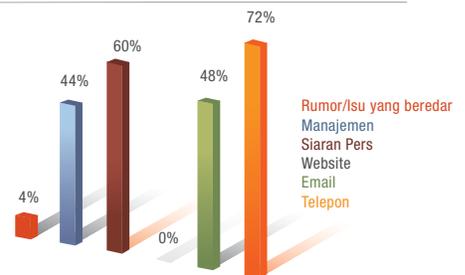
1. Konferensi Pers (4 kali)
2. Press release (25 kali)
3. Berita di Media (2,842 berita)
4. Pertemuan Media (72 kali)
5. RUPST dan RUPSLB (1 kali).



Grafik Frekuensi Informasi Danamon yang diterima Media



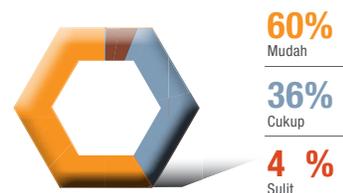
Grafik Sumber Informasi Tentang Danamon



Grafik Penilaian Terhadap Isi Siaran Pers



Grafik Tingkat Kemudahan Mendapatkan Informasi



## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

### Siaran Pers 2009

Berikut data kegiatan Danamon yang dipublikasikan melalui siaran pers.

Bulan	Kegiatan
<b>Januari</b>	
15	Pembukaan kantor cabang baru Danamon yang berlokasi di Gedung 'The Jakarta Post'. Pembukaan ini merupakan pembukaan kantor cabang pertama dari serangkaian rencana Perseroan untuk membuka 18 kantor cabang baru di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2009.
21	Paparan kinerja Perseroan untuk akhir tahun 2008.
29	Danamon Peduli meluncurkan unit pasar pengolahan sampah di Pasar Cisarua – Bogor. Peresmian ini merupakan peresmian ke-4 setelah peresmian sebelumnya dilakukan di Bantul, Sragen, Wonosobo.
<b>Pebruari</b>	
12	Paparan kinerja Perseroan akhir tahun 2008 yang telah diaudit.
13	Pengumuman atas tercapainya kesepakatan untuk melakukan mediasi melalui Bank Indonesia, sehubungan dengan permasalahan kontrak USD selling antara Perseroan dan Elnusa.
18	Perseroan melakukan rights issue dengan total nilai sebesar Rp4 triliun.
19	Serikat Pekerja Perseroan menandatangani perjanjian kerja bersama untuk periode 1 Agustus 2009 – 31 Juli 2011.
27	Yayasan Danamon Peduli bersama 31 kabupaten/kota membangun produksi pupuk organik.
<b>Maret</b>	
10	Danamon Simpan Pinjam merayakan hari jadinya ke-5 bersama nasabah dan mengadakan berbagai kegiatan, seperti tumpengan, jalan sehat, outbound, dan lain-lain.
16	Yayasan Danamon Peduli & Pemerintah Kota Probolinggo meluncurkan unit pengolahan sampah pasar menjadi pupuk di TPS Ungup-Ungup, Probolinggo.
23	RUPSLB menyetujui pelaksanaan rights issue ke-4 untuk peningkatan modal perusahaan dan menyetujui pelaksanaan E/MSOP.
<b>April</b>	
21	Pelaksanaan Rights issue Perseroan Rp4 triliun mendapatkan sambutan yang baik dari pasar.
23	Paparan kinerja Perseroan untuk kuartal pertama tahun 2009
<b>Mei</b>	
4	Danamon Peduli meresmikan unit kompos ke-8 di Kendal.
	Informasi mengenai inisiatif terkini dari Indonesia MICE & Corporate Travel Mart 2009 (IMCTM), dimana para klien American Express Corporate dan pemegang kartu American Express Corporate turut berpartisipasi pada acara ini atas undangan khusus dari pihak Danamon.
25	Perseroan menyelenggarakan RUPS dan RUPSLB, dan menghasilkan resolusi berupa persetujuan mengenai pembayaran dividen sebesar 50% dari laba bersih tahun 2008.
<b>Juni</b>	
1	American Express Corporate Card Services dari PT Danamon Indonesia Tbk turut mendukung dan bekerja sama dalam kegiatan Indonesia MICE & Corporate Travel Mart 2009 (IMCTM 2009).
14	Danamon Peduli meresmikan unit pasar pengolahan sampah ke-9 di Pasar Kebon Agung, Probolinggo.

Penyimpangan Internal	Permasalahan Hukum	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	Buyback Saham
Hubungan Investor	<b>Public Affairs</b>	Laporan Dewan Pengawas Syariah	

Bulan	Kegiatan
19	Perseroan meluncurkan layanan Danamon Online Banking – yang merupakan layanan internet banking pertama yang dapat dilakukan dengan menggunakan SMS Token.
22	Perseroan secara resmi mengumumkan keberadaannya sebagai mitra resmi dari Manchester United Asia Tour 2009.
<b>Juli</b>	
9	Perseroan mengumumkan Danamon Young Leaders Award 2009 – sebuah program pendidikan bagi pelajar tingkat perguruan tinggi yang memiliki pengetahuan bisnis serta isu sosial dan lingkungan yang kuat.
16	Paparan kinerja Perseroan untuk kuartal ke-2 tahun 2009.
18	Hari pasar bersih nasional ke-2: lebih dari 11.000 karyawan DSP melakukan acara membersihkan 750 pasar secara serentak.
	Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia dan Yayasan danamon Peduli mengumumkan pemenang lomba pasar se DIY.
<b>Agustus</b>	
1	Danamon Peduli bersama dengan Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (DPW APPSI), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengumumkan pemenang lomba “Pasar Bersih, Manajemen Pasar dan Pasar Heritage” untuk seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta.
18	Danamon Peduli melanjutkan program kompos sampah pasar di 4 (empat) kota di Sumatera
<b>September</b>	
1	Perseroan mendaftarkan memori kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sehubungan dengan permohonan pailit terhadap Esa Kertas Nusantara.
10	Danamon Peduli mengulurkan tangan bagi korban gempa Tasikmalaya
28	Informasi mengenai pemilihan via online bagi Pemenang BBC World Challenge 2009 untuk program Go Green Danamon Peduli “Nothing Wasted” di BBC World Challenge 2009 telah dimulai.
<b>Oktober</b>	
1	Tim Direksi Perseroan melakukan kunjungan langsung ke lokasi gempa di Padang dan mendukung proses evakuasi korban dari karyawan Perseroan dan Grup Adira.
2	Perseroan memberikan keterangan terkini seputar perkembangan mengenai penanganan korban gempa di Padang terhadap karyawan Perseroan & Adira Grup
16	Danamon Peduli melanjutkan program kompos sampah pasar di 6 (enam) kota di Sulawesi
<b>Desember</b>	
8	Pengumuman program Kompos sampah pasar Danamon Peduli Go Green Danamon Peduli “Nothing Wasted” terpilih sebagai runner up pertama pada BBC World Challenge 2009.

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

### 29. LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Unit Usaha Syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang anggota-anggotanya ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), sebuah badan di bawah Majelis Ulama Indonesia. Seluruh pedoman produk pendanaan, pembiayaan dan operasional harus disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah untuk menjamin kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Syariah.

Tugas-tugas, kewenangan dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha Perseroan;
- Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Perseroan terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN;
- Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan oleh Perseroan;
- Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Perseroan secara keseluruhan dalam laporan publikasi Perseroan;
- Mengkaji produk dan jasa baru yang belum dilengkapi dengan fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN;
- Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direksi, Dewan Komisaris, DSN dan Perseroan

Indonesia, berikut salinannya kepada SKAI. DPS dalam hal ini berhak mendapatkan salinan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Syariah dari SKAI.

#### 29.1. Laporan Dewan Pengawas Syariah tahun 2009 mencakup:

- Memberikan masukan dan opini mengenai produk dan layanan pada Unit Usaha Syariah untuk memastikan kesesuaiannya dengan fatwa yang telah diterbitkan oleh DSN-MUI;
- Memberikan masukan dan opini mengenai seluruh pedoman kerja operasional dan manual produk yang terdapat pada Perseroan;
- Memberikan dan melaporkan hasil pengawasan DPS atas temuan audit, baik temuan audit internal maupun

eksternal (Perseroan Indonesia).

- melakukan pertemuan rutin dengan Management Unit Usaha Syariah untuk mendiskusikan mengenai perkembangan dan masalah-masalah yang terjadi dalam kegiatan pelaksanaan perPerseroan syariah sehari-hari.

#### 29.2. Anggota Dewan Pengawasan Syariah terdiri atas:

1. Prof.Dr. H.M. Din Syamsuddin MA (Ketua)
2. Drs. H. Hasanudin M.Ag (Anggota)
3. Ir. H. Adiwarmanto A.Karim, SE, MBA (Anggota)<sup>\*)</sup>

Note:

\*) Ir. H. Adiwarmanto A. Karim, SE, MBA mengundurkan diri pada tanggal 4 Januari 2010, pengunduran diri Ir. H. Adiwarmanto A. Karim, SE, MBA akan menjadi efektif pada RUPS Perseroan tahun 2010.

#### Remunerasi Dewan Pengawas Syariah Tahun 2009

Jenis Remunerasi & Fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun
	Dewan Pengawas Syariah
Remunerasi Honor	Rp. 415,450,000

PT Bank Danamon Indonesia Tbk.,



**Ng Kee Choe**  
Komisaris Utama



**Sebastian Paredes**  
Direktur Utama

Penyimpangan Internal	Permasalahan Hukum	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	Buyback Saham
Hubungan Investor	Public Affairs	Laporan Dewan Pengawas Syariah	

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2009, di Jakarta, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

**Agenda Pertama:**

1. Menyetujui Penawaran Umum Terbatas IV (PUT IV) kepada Para Pemegang Saham dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yaitu dengan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Saham baru Perseroan yang akan dikeluarkan adalah sebanyak-banyaknya 3.328.206.411 saham seri B biasa atas nama dengan nilai nominal Rp. 500,- per saham yang ditawarkan dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.200,- setiap saham.
  - b. Pengeluaran saham baru tersebut akan dilakukan dengan cara menerbitkan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 April 2009 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dengan memperhatikan semua ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia dimana saham

Perseroan dicatatkan.

- c. Setiap Pemegang 102 saham seri A dan seri B akan memperoleh 67 HMETD, dimana setiap 67 HMETD berhak untuk membeli 67 saham seri B baru yang berasal dari portepel Perseroan dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.200 per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan formulir pemesanan pembelian saham.
- d. Sertifikat bukti HMETD dapat diperdagangkan mulai tanggal 7 April 2009 sampai dengan tanggal 15 April 2009 di dalam Bursa maupun di luar Bursa, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan tersebut harus dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.
- e. Citigroups Global Markets Private Limited dan Morgan Stanley Asia Singapore Private Limited bertindak sebagai Pembeli Siaga yang wajib membeli sisa saham baru dalam rangka PUT IV tersebut sesuai dengan Standby Purchase Agreement tanggal 18 Pebruari 2009 sebagaimana diubah dengan Akta Amended And Restated Standby Purchase Agreement No. 12 tanggal 13 Maret 2009 dan Akta Amendment to Amended And Restated

Standby Purchase Agreement No. 22 tanggal 19 Maret 2009, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

- f. Dana hasil PUT IV, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk pemberian pinjaman yang diberikan (kredit) pada sektor kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta pembiayaan otomotif saat kondisi perekonomian membaik. Pada saat yang sama, PUT IV ini akan memperkuat posisi permodalan Perseroan sehubungan dengan kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Setelah PUT IV ini, proforma rasio Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (konsolidasi) Perseroan per tanggal 31 Desember 2008 akan meningkat menjadi sebesar 20,8%, serta untuk secara proaktif melakukan persiapan dalam rangka implementasi Basel II dan penyediaan modal untuk risiko operasional (yang akan diterapkan pada tahun 2010) yang diperkirakan akan mengurangi rasio Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (konsolidasi) sekitar 3% - 4%.
- g. Persyaratan-persyaratan lainnya sehubungan dengan PUT IV kepada para pemegang saham termasuk jadwal pelaksanaan PUT IV dapat dilihat pada prospektus yang

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

diterbitkan Perseroan dalam rangka PUT IV ini.

- h. Terhadap PUT IV berlaku ketentuan Pasar Modal, Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Bursa Efek Indonesia.

2. Sehubungan dengan dilakukannya PUT IV, menyetujui untuk:

- a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan PUT IV Perseroan;
- b. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor hasil pengeluaran saham seri B baru setelah nama pemegang saham yang memperoleh saham dari PUT IV ini tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan demikian merubah Pasal 4 ayat 2 dan 3 anggaran dasar Perseroan, termasuk untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diputuskan pada agenda kedua Rapat ini.

### Agenda Kedua:

1. Menyetujui penyesuaian Employee/ Management Stock Option Program (E/MSOP) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penggunaan metode Equivalent Economic Value Concept dalam

melakukan penghitungan harga pelaksanaan terhadap opsi yang masih tersedia (opsi yang masih outstanding);

- b. Penetapan tanggal 1 April 2009 sebagai Tanggal Perubahan (Modification Date) dan tanggal 15 April 2009 sebagai Tanggal Mulai Berlakunya Perubahan (Effective Date);
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian dan penetapan harga pelaksanaan E/MSOP sesuai dengan metode dan cara perhitungan sebagaimana tersebut pada huruf 1 di atas.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2009, di Jakarta, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

### RUPST

#### Agenda Pertama :

- a. menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008;
- b. mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, anggota firma KPMG International

sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 12 Maret 2009 Nomor L.08-3351-09/ III.12.002, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian,

- c. mengesahkan Laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, dan
- d. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (volledig acquit en decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

#### Agenda Kedua :

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp. 1.530.022.000.000, dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1% dari laba bersih atau Rp.15.300.220.000 disisihkan untuk dana cadangan, memenuhi Pasal 70 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");
- b. 50% dari laba bersih atau Rp.765.011.000.000 atau kurang lebih sebesar Rp.90,82 per saham dengan asumsi bahwa jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan tidak lebih dari 8.423.625.816 saham dibayarkan

Penyimpangan Internal	Permasalahan Hukum	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	Buyback Saham
Hubungan Investor	Public Affairs	Laporan Dewan Pengawas Syariah	RUPST

sebagai dividen untuk tahun buku 2008, dengan ketentuan sebagai berikut :

- i. dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan");
- ii. total dividen yang akan dibayarkan adalah berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan oleh Perseroan pada Tanggal Pencatatan sebagaimana tersebut dalam butir (i) di atas, termasuk jumlah saham yang diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka Employee/ Management Stock Option Program sampai dengan tanggal tersebut;
- iii. atas dividen tahun buku 2008 tersebut Direksi akan memotong pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham;
- iv. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2007, antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada) :
  - menentukan Tanggal

Pencatatan untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2008; dan

- menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2007, segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat;

- c. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2008 yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp749.711.000.000 ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.

#### Agenda Ketiga :

- a. Menyetujui pengangkatan Fransiska Oei Lan Siem selaku anggota Direksi Perseroan yang akan efektif menjabat terhitung sejak saat Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi yang menjabat saat ini. Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

#### DIREKSI

Direktur Utama :  
 Juan Eugenio Sebastian Paredes Muirragui  
 Wakil Direktur Utama :  
 Joseph Fellipus Peter Luhukay  
 Direktur :  
 Muliadi Rahardja  
 Direktur :  
 Ali Rukmijah (Ali Yong)  
 Direktur :  
 Vera Eve Lim  
 Direktur :  
 Sanjiv Malhotra  
 Direktur :  
 Herry Hykmanto  
 Direktur :  
 Kanchan Keshav Nijasure  
 Direktur :  
 Fransiska Oei Lan Siem

Dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2010, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2011, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

- b. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta-akta yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan ketentuan yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

### Agenda keempat :

- (i). menyetujui total pembayaran Tantieme/bonus yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2008 sebesar Rp. 9.150.000.000
- (ii). Menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Tahun Buku 2009 yaitu sekitar Rp. 14.055.000.000 gross;
- (iii). Menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya Tantieme/bonus selama tahun buku 2008 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2009 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi No. B. 002-KRN tanggal 25 Mei 2009 dan No. B. 004-KRN tanggal 25 Mei 2009;
- (iv). Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2009, berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi No. B. 006-KRN tanggal 25 Mei 2009.

### Agenda Kelima :

1. (i) Menyetujui total pembayaran Tantieme yang akan dibagikan kepada Direksi untuk Tahun Buku 2008 sebesar Rp. 28.212.500.000 gross;
- (ii) Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Tantieme selama tahun buku 2008 serta besarnya gaji/honorarium bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan dan tunjangan untuk tahun buku 2009 bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan, berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi No. B. 003-KRN tanggal 25 Mei 2009 dan No. B. 005-KRN tanggal 25 Mei 2009;
2. Sesuai pasal 92 ayat 5 dan 6 Undang-undang Perseroan Terbatas, Perseroan dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham bahwa pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan akan ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

### Agenda Keenam :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

(Bapepam – LK) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2009 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjang Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

### Agenda Ketujuh

Laporan kepada para pemegang saham bahwa Direksi Perseroan telah melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diwajibkan Peraturan Bapepam – LK nomor IX.J.1., sebagaimana dimuat dalam akta Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 31 Maret 2009 nomor 87, dibuat dihadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Notaris di Jakarta.

### RUPSLB

#### Agenda Pertama :

1. Menyetujui pelaksanaan hak opsi Perseroan untuk membeli tambahan saham dalam PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (“ADMF”) sebanyak-banyaknya 20% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan ADMF milik Mega Value Profit Limited seluruhnya dengan harga Rp. 1.614.000.000.000 dimana didalamnya telah termasuk premi atas hak opsi sebesar Rp. 187 miliar yang telah dibayar oleh Perseroan pada saat

Penyimpangan Internal	Permasalahan Hukum	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	Buyback Saham
Hubungan Investor	Public Affairs	Laporan Dewan Pengawas Syariah	RUPSLB

diterbitkannya hak opsi, dengan ketentuan bahwa seluruh syarat dan kondisi-kondisi sehubungan dengan Transaksi Penambahan Penyertaan Saham tersebut telah terlebih dahulu disetujui oleh Direksi Perseroan.

2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka Transaksi Penambahan Penyertaan Saham dalam ADMF sebanyak-banyaknya 20% sebagai akibat pelaksanaan hak opsi yang dimiliki oleh Perseroan, dengan ketentuan bahwa seluruh syarat dan kondisi-kondisi sehubungan dengan Transaksi Penambahan Penyertaan Saham tersebut telah disetujui terlebih dahulu oleh Direksi.
3. Menyetujui bahwa apabila keputusan atas agenda ini tidak dapat dilaksanakan yang diakibatkan dari tidak disetujuinya salah satu atau seluruh syarat-syarat dan kondisi-kondisi sehubungan dengan Transaksi Penambahan Penyertaan Saham ini oleh Direksi Perseroan, maka suatu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut keputusan pemegang saham ini tidak diperlukan. Dalam hal terjadinya kondisi demikian, Direksi Perseroan diberikan wewenang untuk

melakukan keterbukaan kepada publik sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

#### Agenda Kedua :

1. Menyetujui pengambilalihan saham PT Asuransi Adira Dinamika (“Asuransi Adira”) sebanyak-banyaknya 90%, dengan ketentuan bahwa seluruh syarat dan kondisi-kondisi pengambilalihan saham tersebut telah terlebih dahulu disetujui oleh Direksi Perseroan.
2. Memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pengambilalihan saham Asuransi Adira sebanyak-banyaknya 90%, dengan ketentuan bahwa seluruh syarat dan kondisi-kondisi pengambilalihan saham-saham tersebut telah terlebih dahulu disetujui oleh Direksi Perseroan.
3. Menyetujui bahwa apabila keputusan atas agenda ini tidak dapat dilaksanakan dari tidak disetujuinya salah satu atau seluruh syarat-syarat dan kondisi-kondisi sehubungan dengan pengambilalihan Asuransi Adira oleh Direksi Perseroan, maka suatu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut keputusan pemegang saham ini tidak diperlukan. Dalam hal terjadinya kondisi demikian, Direksi Perseroan

diberikan wewenang untuk melakukan keterbukaan kepada publik sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

## Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

### Daftar Tabel, Bagan, Gambar, dan Lampiran

1. Anggota Dewan Komisaris Perseroan Telah Memperoleh Persetujuan Bank Indonesia dan Telah Lulus Fit And Proper Test beserta data domisili (Tabel)
2. Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat Dewan Komisaris (Tabel)
3. Agenda yang Dibahas dalam Rapat-Rapat Dewan Komisaris Perseroan Selama Tahun 2009 (Tabel)
4. Remunerasi Dewan Komisaris (Tabel)
5. Klasifikasi Remunerasi Dewan Komisaris (Tabel)
6. Komposisi Komite Audit Perseroan (Tabel)
7. Tingkat Kehadiran dalam Rapat Komite Audit (Tabel)
8. Fokus Kajian Komite Audit di Tahun 2009 (Tabel)
9. Agenda yang Dibahas dalam Rapat-Rapat Komite Audit Perseroan Selama Tahun 2009 (Tabel)
10. Komposisi Komite Pemantau Risiko Perseroan (Tabel)
11. Tingkat Kehadiran dalam Rapat Komite Pemantau Risiko (Tabel)
12. Fokus Kajian Komite Pemantau Risiko di Tahun 2009 (Tabel)
13. Agenda yang Dibahas dalam Rapat-Rapat Komite Pemantau Risiko Selama Tahun 2009 (Tabel)
14. Keanggotaan Komite Nominasi & Remunerasi (Tabel)
15. Tingkat Kehadiran dalam Rapat Komite Nominasi & Remunerasi (Tabel)
16. Fokus Kajian Komite Nominasi & Remunerasi di Tahun 2009 (Tabel)
17. Agenda yang Dibahas dalam Rapat-Rapat Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan Selama Tahun 2009 (Tabel)
18. Keanggotaan Komite Tata Kelola (Tabel)
19. Tingkat Kehadiran dalam Rapat Komite Tata Kelola (Tabel)
20. Agenda yang Dibahas dalam Rapat-Rapat Komite Tata Kelola Perseroan Selama Tahun 2009 (Tabel)
21. Uji Kemampuan dan Kelayakan Bank Indonesia Anggota Direksi (Tabel)
22. Tingkat Kehadiran dalam Rapat Direksi (Tabel)
23. Agenda yang Dibahas dalam Rapat-Rapat Direksi Perseroan Selama Tahun 2009 (Tabel)
24. Remunerasi Direksi (Tabel)
25. Klasifikasi Remunerasi Direksi (Table)
26. Keanggotaan Komite-Komite di Bawah Direksi (Tabel)
27. Rincian Kehadiran anggota Komite-Komite dalam Rapat-Rapat Komite Selama Tahun 2009 (Tabel)
28. Agenda Komite Risiko Selama Tahun 2009 (Tabel)
29. Agenda Komite Operasi Selama Tahun 2009 (Tabel)

Penyimpangan Internal	Permasalahan Hukum	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	Buyback Saham
Hubungan Investor	Public Affairs	Laporan Dewan Pengawas Syariah	Lampiran

30. Agenda Komite Asst & Liability Selama Tahun 2009 (Tabel)
31. Agenda Komite Pengarah Teknologi Informasi di Tahun 2009 (Tabel)
32. Agenda Komite Sumber Daya Manusia Selama Tahun 2009 (Tabel)
33. Agenda Komite Business Executive Selama Tahun 2009 (Tabel)
34. Agenda Komite Fraud Selama Tahun 2009 (Tabel)
35. Laporan Evaluasi Kesehatan Perseroan Per 31 Desember 2009 (Tabel)
36. Struktur Organisasi Kepatuhan (Bagan)
37. Struktur Organisasi UKPN (Bagan)
38. Struktur Organisasi SKAI (Bagan)
39. Metodologi Audit 2009 (Gambar)
40. Struktur Organisasi Operasi (Bagan)
41. Lingkup Kontrol Operasional (Gambar)
42. Rating Komposit (Tabel)
43. Credit Ratings (Tabel)
44. Kredit Kepada Pihak Terkait dan Kredit Berskala Besar Per 31 Desember 2009 (Tabel)
45. Anggota Direksi yang Telah Menerima Opsi Saham Per 31 Desember 2009 (Tabel)
46. Kepemilikan Saham Perseroan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi (Tabel)
47. Rasio Perbandingan Gaji (Tabel)
48. Internal Fraud (Tabel)
49. Rekapitulasi Laporan Perkara Pidana dan Perdata Per 31 Desember 2009 (Tabel)
50. Laporan Pengeluaran Yayasan Danamon Peduli Tahun 2009
51. Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit Self Assessment Corporate Governance (Tabel)
52. Nilai Komposit dan Predikat Komposit (Tabel)
53. Kalender Kegiatan Tindakan Korporasi Selama Tahun 2009 (Tabel)
54. Daftar Keterbukaan Perseroan Selama Tahun 2009 (Tabel)
55. Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan (Bagan)
56. Kegiatan Penyebarluasan Informasi (Tabel)
57. Daftar Forum Internal Communication Selama Tahun 2009 (Tabel)
58. Road Show 2009 (Tabel)
59. Grafik Frekuensi Penerimaan Informasi dari Danamon Oleh Media (Bagan)
60. Grafik Sumber Informasi Tentang Danamon (Bagan)
61. Grafik Penilaian Terhadap Isi Siaran Pers (Bagan)
62. Grafik Tingkat Kemudahan Mendapatkan Informasi
63. Siaran Pers 2009 (Tabel)
64. Remunerasi Dewan Pengawas Syariah Tahun 2009 (Tabel)
65. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (Lampiran)